

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI
TINGKAT KESEHATAN FINANSIAL PERUSAHAAN
STUDI KASUS PADA PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
TAHUN 1994 – 1996**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

HENGKI H SIMANJUNTAK

NIM : 93.2114.149

NIRM : 930051121303120142

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1999**

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI
TINGKAT KESEHATAN FINANSIAL PERUSAHAAN**
STUDI KASUS PADA PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
TAHUN 1994 – 1996

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

HENGKI H SIMANJUNTAK
NIM : 93.2114.149
NIRM : 930051121303120142

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1999**

SKRIPSI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI TINGKAT KESEHATAN FINANSIAL PERUSAHAAN STUDI KASUS PADA PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT TAHUN 1994 – 1996

Oleh :

HENGKI H SIMANJUNTAK
NIM : 93.2114.149
NIRM : 930051121303120142

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Tanggal : 15 September 1999



Drs. Alex Kahu Lantum., M.S

Pembimbing II

Tanggal : 8 Oktober 1999



Drs. H. Suseno TW., M.S

S k r i p s i

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI
TINGKAT KESEHATAN FINANSIAL PERUSAHAAN**

STUDI KASUS PADA PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
TAHUN 1994 – 1996

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

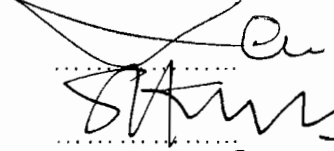
HENGKI H SIMANJUNTAK

N I M : 93.2114.149

N I R M : 930051121303120142

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 30 Oktober 1999
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.	
Sekretaris	Drs. E. Sumardjono, M.B.A.	
Anggota	Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.	
Anggota	Drs. H. Suseno TW, M.s.	
Anggota	Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.	

Yogyakarta, 30 Oktober 1999

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan




Drs. Th. Gieles, S.J.

**" AKU BERSYUKUR KEPADAMU,
SEBAB ENGKAU TELAH MENJAWAB AKU DAN TELAH
MENJADI KESELAMATANKU " (MAZ 118,21)**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

*Kedua Orang Tuaku tercinta atas segala dukungan
dan doanya serta kesabarannya kepadaku dalam meraih
segala harapan dan cita-citaku*

*Kakak-kakakku : Eva (Kel. Napitupulu), Vince
(Kel. Josi) yang selalu memperhatikanku*

*Adik-adikku : Johana, David, James & Artha, sukses
juga untuk kalian*

Semua bere-bereku : Ika, Jovi & Ucok

Seseorang yang terdekat dihatiku IYO (Yosefa)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 30 Oktober 1999

Penulis,


Hengki H. Simanjuntak

ABSTRAK

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI TINGKAT KESEHATAN FINANSIAL PERUSAHAAN

STUDI KASUS PADA PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
TAHUN 1994 – 1996

Hengki H Simanjuntak
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
1999

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui besarnya imbalan kepada pemegang saham, imbalan investasi, tingkat rasio kas, tingkat rasio lancar, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran total asset, besarnya tingkat rasio modal sendiri terhadap total asset, dan (2) mengetahui kinerja perusahaan yang diukur melalui tingkat kesehatan finansial perusahaan berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 198/KMK.016/1998.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah (1) analisis rasio laporan keuangan berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998, langkah yang dilakukan adalah menghitung nilai rasio dari indikator-indikator berdasarkan SK Menteri tersebut, dan (2) analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan, langkah yang dilakukan adalah dengan membandingkan hasil penilaian indikator-indikator diatas.

Temuan dari penelitian ini yang dilakukan adalah, perkembangan rasio sudah cukup baik serta kinerja perusahaan lambat laun menjadi baik. Hal ini terbukti dari hasil pengujian dimana bobot kinerja perusahaan jika dibandingkan dengan standar berdasarkan SK Menteri Keuangan mengalami peningkatan yang mengarah pada hasil yang cukup baik.

ABSTRACT

**FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS TO JUDGE
THE FINANCIAL HEALTH OF A COMPANY**

Case Study at Perum Perhutani Unit III West Java
In 1994 – 1996

Hengki H Simanjuntak
Sanata Dharma University
Yogyakarta
1999

This research aims to know, (1) the earnings per share, return on investment, and the development of the financial ratios, and (2) evaluate the company's financial health according to the decree of the Minister of Finance of the Republic Indonesia No. 198/KMK.016/1998.

The data gathering techniques were interview, observation, and documentation. The data analysis comprises, (1) ratio analysis of the financial statement based on the decree of the Finance Minister No. 198/KMK.016/1998, and (2) analysis of the financial statements to evaluate the company's performance, by comparing the result of the indicators mentioned.

The findings of this research are that the development of the financial ratios was positive and the company's performance was improving compared with the standard based on the decree of the Finance Minister.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Bapa Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, rasanya skripsi ini tidak mungkin terselesaikan. Karenanya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Romo Drs. Th. Gieles, S.J., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan semangat serta saran dalam penulisan ini.
4. Drs. H Suseno TW, M.S., sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan semangat serta saran dalam penulisan ini.
5. Drs. Th. Sutadi, MBA., yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis dalam penulisan ini.

6. Drs. Gatot Hariono., selaku Kepala Seksi Akuntansi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat yang telah memberikan ijin penelitian bagi penulis.
7. Ibu Nunung Hadidjah, selaku KSS Akuntansi Keuangan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.
8. Bapak Uda M. Simanjuntak, SH, dan Nyonya., selaku karyawan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat yang telah memberikan jalan untuk penelitian, serta semangat dan saran bagi penulis.
9. Bapak Uda T. Simanjuntak, SH., “ Thanks for your motivation “
10. Segenap Staff Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah banyak memberikan masukan bagi penulisan ini.
11. Keluargaku; pap & mam, kakak-kakakku, dan adik-adikku yang selalu membrikan dorongan dan doa serta dukungannya.
12. Sosefa Suciati, SE., yang telah banyak memberikan perhatian dan dukungannya.
13. Ompung Tagor Simanjuntak, SH, CN., “terima kasih untuk *remengannya*”
14. Sahabat-sahabatku: Haris (bodeng), Ronald (Paul Masters), Bapak Gevin dan Nyonya, Bang Fritz (Doyok), Ime & Ita S'tak, Roy (trim's atas printer dan komputernya), Dab Bulus (Rahma), serta masyarakat Brojodento 293 B, NPSSSI boru dan Berenya se-DIY, Himpunan Mahasiswa Batak's (Sada Pardomuan) Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis juga menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna. Kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi ini sangatlah diharapkan, sehingga penulis senantiasa dapat memperbaiki diri.

Akhirnya penulis mengharapkan agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Yogyakarta, 30 Oktober 1999

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Peranan BUMN	9
B. Pengertian Laporan Keuangan	16
C. Tujuan Laporan Keuangan	18
D. Peranan Laporan Keuangan	20
E. Analisis Laporan Keuangan	21
1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan	21
2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan	21
F. Analisis Rasio Laporan Keuangan	22
1. Pengertian Analisis Rasio Laporan Keuangan	22
2. Penggolongan Angka Rasio Analisis Laporan Keuangan	23
G. Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 198/KMK.016/1998	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Subyek dan Obyek Penelitian	37
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Data yang Diperlukan	39

F. Definisi Operasional	40
G. Teknik Analisis Data	41

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan	45
B. Dasar Pendirian	47
C. Tugas dan Sifat Usaha	48
D. Misi, Filosofi dan Tujuan	48
E. Susunan Organisasi, Pimpinan Tugas Pokok dan Tata Kerja	49
F. Lambang Perum Perhutani	63
G. Produksi Hasil Hutan	64

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

A. Deskripsi Data	66
B. Analisis Data	73
1. Analisis rasio laporan keuangan menurut SK Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998	73
2. Penilaian kinerja berdasarkan SK Menteri Keuangan yang diukur melalui tingkat kesehatan keuangan perusahaan	87
C. Pembahasan	91

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	102
B. Keterbatasan Penelitian	105
C. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Neraca per 31 Desember 1994
Tabel 5.2	Laporan Laba Rugi Tahun 1994
Tabel 5.3	Neraca per 31 Desember 1995
Tabel 5.4	Laporan Laba Rugi tahun 1995
Tabel 5.5	Neraca per 31 Desember 1996
Tabel 5.6	Laporan laba Rugi tahun 1996
Tabel 5.7	Daftar Tingkat Imbalan pada Pemegang Saham
Tabel 5.8	Daftar Tingkat Imbalan Investasi
Tabel 5.9	Daftar Tingkat Rasio Kas
Tabel 5.10	Daftar Tingkat Rasio Lancar
Tabel 5.11	Daftar Tingkat Collection Periods
Tabel 5.12	Daftar Tingkat Perputaran Persediaan
Tabel 5.13	Daftar Tingkat Perputaran Total Asset
Tabel 5.14	Daftar Tingkat Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu perusahaan tidak hanya dapat dilihat dari hasil ekspansi atau pembangunan gedungnya saja, karena pembangunan gedung atau ekspansi dapat dibiayai dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ataupun dengan modal sendiri. Hal tersebut jika kita melihat dari sisi luarnya perusahaan saja.

Untuk mengetahui tingkat perkembangan yang sebenarnya perlu adanya suatu analisis, sehingga bisa diketahui apakah tindakan atau kebijakan perusahaan yang ditempuh sudah tepat atau belum.

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengetahui kinerja dan kondisi suatu perusahaan adalah laporan keuangan yang disusun setiap akhir /periode tertentu. Laporan keuangan merupakan alat pertanggung jawaban pengelola perusahaan kepada para pemilik perusahaan . Laporan keuangan yang dimaksud adalah data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang berupa neraca dan laporan rugi laba (yang umum digunakan oleh perusahaan).

Neraca menunjukkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada saat tertentu. Laporan rugi laba menunjukkan hasil operasi yang dicapai selama satu periode tertentu, yang biasanya dilaporkan tiap akhir tahun. Dari laporan keuangan

tersebut bukan hanya pihak pimpinan perusahaan saja yang memerlukan atau yang membutuhkannya melainkan bagi pihak luar atau kreditur yang menjadi debitur bagi pihak perusahaan.

Para kreditur berkepentingan untuk keamanan mereka sendiri, misalkan dana yang mereka tanamkan (investasikan) di dalam perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pihak kreditur itu sendiri. Para investorpun berkepentingan terhadap laporan finansial suatu perusahaan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya .

Dari hasil analisis laporan keuangan perusahaan ini akan bermanfaat bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui kinerja dan kondisi keuangan dari perusahaan yang dipimpinnya. Oleh karena itu akan dapat diketahui hasil-hasil kegiatan operasional perusahaan yang dapat dicapai diwaktu yang lalu. Hasil analisa historis tersebut sangat penting artinya bagi perbaikan penyusunan rencana dan kebijakan perusahaan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.

Sedangkan dalam hubungannya dengan BUMN yang juga merupakan konteks perekonomian Indonesia mempunyai tempat yang penting, bukan saja eksistensinya secara tersirat disinggung dalam UUD 1945 melainkan juga karena diperlukan investasi untuk produksi barang dan jasa yang tidak menarik atau terlalu besar untuk dapat dilaksanakan oleh swasta.

Di Indonesia BUMN didirikan atas pertimbangan yang bermacam-macam, dan bahkan yang seakan-akan “secara kebetulan” dibentuk sebagai akibat merebut

Irian Barat dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Kini BUMN dalam garis besarnya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Perjan, Perum dan Persero.

Dalam perkembangannya BUMN secara keseluruhan selalu disorot masyarakat karena tata kerjanya yang tidak efisien dan tidak produktif. Inefisiensi dan rendahnya produktifitas BUMN konon karena intervensi yang terlalu besar dari departemen teknis yang membawahinya. Untuk sebagian BUMN mungkin sekali pendapat ini benar, tetapi untuk sebagian BUMN yang lain barangkali tidak tepat. Hal ini perlu penelitian yang lebih mendalam.

Dalam rangka mengurangi pengeluaran pemerintah untuk subsidi BUMN maka dilakukan penilaian kinerja BUMN, Pedoman penilaian tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992 dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/KMK.016/1998, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMN.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di **Perum Perhutani Unit III Jawa Barat** dengan judul “ **Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Yang Dicerminkan Dengan Tingkat Kesehatan Finansial Perusahaan** ”

B. Perumusan Masalah

1. Masalah Khusus

- a. Berapakah besarnya Imbalan Kepada Pemegang saham (*Return on Equity*) ?
- b. Berapakah besarnya Imbalan Investasi (*Return on Investment*) ?
- c. Berapakah besarnya tingkat rasio kas (*Cash Ratio*) ?
- d. Berapakah besarnya tingkat rasio lancar (*Current Ratio*) ?
- e. Berapakah besarnya tingkat perputaran piutang (*Collection Periods*) ?
- f. Berapakah besarnya tingkat perputaran persediaan (*Inventory Turnover*) ?
- g. Berapakah besarnya tingkat perputaran total asset (*Total Asset Turn Over*) ?
- h. Berapakah besarnya tingkat rasio modal sendiri terhadap total aktiva ?

2. Masalah Umum

Bagaimana kinerja perusahaan yang diukur melalui tingkat kesehatan finansial perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/KMK.016/1998 ?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan pada laporan keuangan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996, serta analisis laporan keuangan yang hanya memperhitungkan dari aspek keuangan perusahaan saja. Yang menjadi acuan / standar perhitungan tingkat kesehatan perusahaan yang merupakan gambaran

atau cermin dari kinerja perusahaan, penulis hanya mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui besarnya Imbalan Kepada Pemegang saham (*Return on Equity*).
- b. Untuk mengetahui besarnya Imbalan Investasi (*Return on Investment*).
- c. Untuk mengetahui besarnya tingkat rasio kas (*Cash Ratio*).
- d. Untuk mengetahui besarnya tingkat rasio lancar (*Current Ratio*).
- e. Untuk mengetahui besarnya tingkat perputaran piutang (*Collection Periods*).
- f. Untuk mengetahui besarnya tingkat perputaran persediaan (*Inventory Turnover*).
- g. Untuk mengetahui besarnya tingkat perputaran total asset (*Total Asset Turn Over*).
- h. Untuk mengetahui besarnya tingkat rasio modal sendiri terhadap total aktiva.

2. Tujuan umum

Untuk mengetahui kinerja perusahaan yang diukur melalui tingkat kesehatan finansial perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/KMK.016/1998.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan kepada perusahaan untuk mengetahui dan memahami perkembangan kondisi keuangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi-strategi dimasa-masa mendatang, setelah mengetahui kinerja perusahaan yang dipimpinnya.

2. Bagi Universitas

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu contoh konkret untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan.
- b. Dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang memerlukan dan menambah referensi bahan kepustakaan bagi universitas.

3. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam menerapkan teori diperoleh penulis, khususnya mengenai analisa laporan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998, dan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi enam bab, yakni:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan landasan teori dan penulisan skripsi ini yang meliputi: Pengertian Laporan Keuangan, Tujuan Laporan Keuangan, Peranan Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, Analisis Ratio Laporan keuangan, serta Penilaian Kinerja Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No.198/KMK.016/1998.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian dari penulisan skripsi ini, yaitu meliputi: metode penelitian, subyek dan obyek

penelitian, waktu dan lokasi penelitian, data yang dicari, teknik penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini akan menguraikan gambaran umum perusahaan dari hasil temuan lapangan yang terdiri dari: sejarah singkat perusahaan, jenis usaha perusahaan, uraian tugas, struktur organisasi perusahaan, dan hasil laporan keuangan tahunan.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan analisis hasil laporan keuangan perusahaan dan mengukur tingkat kesehatan finansial perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998 untuk mengetahui tingkat kinerja perusahaan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran tentang hasil pengamatan dan penelitian sejauh yang penulis dapatkan dari hasil informasi pihak perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Peranan BUMN

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.740/KMK.00/1989 yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah: Badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara (pasal 1 ayat 2a). Atau badan usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara tetapi statusnya disamakan dengan BUMN yaitu: (Pandji Anoraga, 1995, hal.1)

1. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
2. BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.
3. BUMN yang menetapkan badan-badan usaha patungan dengan swasta nasional / asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal 51 %.

Bahasa asingnya BUMN adalah ¹public ^{2 (bisnis)}enterprise. Dengan demikian BUMN berisikan dua elemen yakni unsur pemerintah (*public*). BUMN tidaklah murni pemerintah 100 persen dan tidak juga murni bisnis 100 persen. Berapa besar persentase masing-masing elemen itu disuatu BUMN tergantung pada jenis atau tipe BUMN-nya. Dalam hal Perjan unsur pemerintah lebih besar dari unsur bisnis, sedangkan untuk Persero unsur bisnisnya lebih dominan dari unsur pemerintah.

Perum boleh dikatakan *fifty-fifty*. Tetapi yang pasti disetiap jenis BUMN kedua unsur tersebut pasti harus ada.

Untuk lebih jelas mengenai klasifikasi dan ciri yang melekat pada masing-masing bentuk BUMN, dapat dilihat sebagai berikut: (Undang-Undang Republik Indonesia No.9, tahun 1969)

1. Perusahaan Jawatan (*Governmental Agency*)

- a. Makna usaha, tujuan perusahaan: *public service*.
- b. Status hukum: bukan badan hukum.
- c. Hubungan organisatoris dengan pemerintah: sebagai bagian dari departemen / ditjen (tidak otonom).
- d. Pemilikan / penguasaan pemerintah: sepenuhnya dan langsung seperti terhadap bagian departemen / ditjen / direktorat.
- e. Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah kepala jawatan yang diangkat oleh pemerintah.
- f. Pengawasan oleh pemerintah: langsung dan secara hirarkis fungsional, pemeriksaan oleh akuntan negara, neraca disahkan oleh menteri.
- g. Kekayaan / permodalan: dari pemerintah melalui anggaran belanja tahunan.
- h. Status kepegawaian: pegawai negeri.
- i. Ruang lingkup usaha: pada umumnya *public utility* yang bersifat vital dan strategis.

2. Perusahaan Umum (*Public Corporation*)

- a. Makna usaha, tujuan perusahaan: public service dan profit seimbang / kondisional.
- b. Status hukum: badan hukum berdasarkan UU 19 prp tahun 1960 dan PP / pendirian.
- c. Hubungan organisatoris: berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah (otonom).
- d. Pemilikan / penguasaan oleh pemerintah: sepenuhnya dan tidak langsung yaitu melalui penanaman kekayaan negara yang dipisahkan.
- e. Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah suatu direksi yang diangkat oleh pemerintah.
- f. Pengawasan oleh pemerintah: melalui pejabat atau badan hukum yang berfungsi seperti komisaris. Pemeriksaan oleh akuntan negara, neraca disahkan menteri.
- g. Kekayaan / permodalan: dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan modal dasar perum. Modal tidak terbagi dalam saham.
- h. Status kepegawaian: pegawai perusahaan negara berdasarkan undang-undang tersendiri.
- i. Ruang lingkup kegiatan usaha: pada umumnya usaha-usaha penting berupa *public utility / service*.

3. Persero (*Governmental / State Company*)

- a. Makna usaha, tujuan perusahaan: profit sebagai titik berat.

- b. Status hukum: badan hukum berdasarkan KUHD dan PP pendirian (dengan akte notaris).
- c. Hubungan organisatoris dengan pemerintah: dapat sepenuhnya atau sebagian yaitu melalui pemilikan saham secara keseluruhan atau sebagian.
- d. Pemilikan / penguasaan oleh pemerintah: dapat sepenuhnya atau sebagian yaitu melalui pemilikan saham secara keseluruhan atau sebagian.
- e. Pengurusan oleh pemerintah: pimpinan adalah suatu direksi, diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
- f. Pengawasan oleh pemerintah: melalui dewan komisaris yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
- g. Kekayaan / permodalan: dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan modal dasar Persero, untuk keseluruhan atau sebagian modal perseroan terbagi dalam saham-saham.
- h. Status kepegawaian: pegawai perusahaan swasta biasa.
- i. Ruang lingkup kegiatan usaha: seperti pada perusahaan swasta biasa.

Sedangkan peranan BUMN erat berkaitan dengan berbagai tujuan yang perlu dicapai BUMN, seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1983. PP no.3/1983 ini, yang meliputi kegiatan BUMN, dan Perusahaan Jawatan (Perjan), menetapkan bahwa tujuan-tujuan BUMN adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi negara pada umumnya dan penerimaan negara khususnya.
2. Mengadakan pemupukan keuntungan dan pendapatan.

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan antara lain menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu.
6. Turut aktif memberikan bimbingan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi.
7. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan umumnya.

Kenyataan bahwa BUMN tidak hanya berperan sebagai usaha bisnis semata-mata, akan tetapi juga merupakan bagian dari aparatur negara seringkali menyebabkan bahwa BUMN menjadi birokratis dan kehilangan keluwesan dan kegiatan usaha yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan bisnis. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa pada umumnya prestasi BUMN sebagai usaha bisnis yang efisien kurang memuaskan, malahan sering menderita rugi, sehingga harus diberikan subsidi oleh pemerintah.

Ada beberapa arahan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tahun 1983 tentang tujuan pembentukan BUMN, antara lain sebagai berikut:

- menyangkang perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara.

- Mampu berjalan baik dan memupuk keuntungan.
- Bermanfaat bagi umum terutama dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.
- Melaksanakan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi serta bersifat melengkapi terutama dalam menyediakan kebutuhan masyarakat luas.
- Aktif memberikan bimbingan kepada usaha ekonomi lemah dan koperasi.
- Aktif menunjang pelaksanaan program pemerataan.

Melihat tujuan pembentukan BUMN tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tugas yang lazim sebagai badan usaha bisnis yang mencari keuntungan tetap wajib dijalankan. Namun berbagai tugas pelaksanaan program pemerintah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas yang diembannya. Walaupun dibidang usaha-usaha tertentu, seperti bentuk-bentuk kegiatan yang masuk kategori menguasai hajat hidup orang banyak dan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh BUMN, namun tidak berarti mereka memiliki ruang gerak yang lebih longgar dibanding sektor swasta dalam memanfaatkan kelonggaran serta kelebihan tersebut.

Dilain pihak segala bentuk kemudahan dan segala fasilitas yang pernah ada dimasa lalu justru sering menjadikan BUMN yang bersangkutan kurang efisien, kurang perhatian terhadap upaya-upaya yang pengelolaan usaha secara profesional, sehingga tidak jarang hanya merupakan perpanjangan tangan suatu departemen yang kurang menguntungkan bagi operasi suatu lembaga bisnis.

Di Indonesia peranan BUMN kini tidak lagi sebatas pada pengelolaan sumber daya produksi barang-barang yang meliputi hajat hidup orang banyak tetapi juga dalam berbagai kegiatan produksi dan pelayanan yang dilakukan oleh swasta.

Beberapa hal pokok yang menjadi peran BUMN di Indonesia, seperti: perlunya *public goods* untuk dikelola oleh pemerintah, pertimbangan efisiensi untuk kegiatan ekonomi berskala besar, dan pengendalian dampak negatif seperti masalah eksternalitas.

Masalah *public goods* merupakan perkecualian didalam sistem dan mekanisme pasar. Agar kemanfaatannya tidak jatuh ketangan perorangan, maka negara mengambil peranan aktif karena komoditi tersebut sangat diperlukan masyarakat umum. Negara, khususnya ketika usaha swasta belum tumbuh seperti pada masa awal kemerdekaan, telah mengambil inisiatif untuk menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat.

B. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah laporan pertanggung jawaban manajemen atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya, kepada pihak-pihak luar perusahaan, pemilik perusahaan, pemerintah, kreditur, dan pihak lainnya. Laporan keuangan pada hakekatnya bersifat umum, dalam arti bahwa laporan keuangan yang ditujukan untuk berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. (Budi Raharja, 1994, hal.1)

Dari laporan keuangan akan terlihat bagaimana perkembangan perusahaan selama periode akuntansi yang bersangkutan dan bagaimana bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Dengan demikian akan tampak perkembangannya dari tahun ketahun dan kondisi keuangan dapat diketahui dengan tepat, baik kekayaan maupun kewajibannya.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti: laporan arus kas laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. (IAI, 1995, hal.2)

Sedangkan menurut Kieso laporan keuangan yang sering disajikan adalah berupa:

1. Neraca

Suatu daftar aktiva, kewajiban, dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu, yang biasanya pada tanggal terakhir suatu bulan atau tahun.

2. perhitungan laba rugi

Ikhtisar dari pendapatan dan beban dari sebuah perusahaan pada periode tertentu, misalnya sebulan atau setahun.

3. laporan arus kas

Ikhtisar penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah kesatuan usaha untuk suatu periode waktu tertentu, seperti sebulan atau setahun.

4. laporan modal pemilik

Ikhtisar perubahan modal pemilik suatu perusahaan yang telah terjadi dalam suatu periode tertentu, misalnya bulan atau tahun.

Pengungkapan dalam catatan merupakan bagian yang terpadu dari masing-masing kelima laporan keuangan dasar ini. (Kieso & Weygandt, 1995, hal.6)

Dua jenis laporan keuangan (utama) yang umumnya dibuat oleh setiap perusahaan adalah: neraca dan laporan rugi laba (dan biasanya dengan laporan perubahan modal), yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: (Dwi Prastowo. D, 1995, hal.16)

1. Neraca

Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban dan ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu.

C. Tujuan Laporan Keuangan

Dalam upaya untuk menetapkan pondasi sebagai dasar bagi akuntansi keuangan dan standar pelaporan, maka pelaporan keuangan harus memberikan informasi:

1. yang berguna bagi investor dan kreditor sekarang dan yang potensial serta pemakai lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit dan semacamnya yang rasional.
2. Guna membantu investor dan kreditor sekarang dan yang potensial serta pemakai lain dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian dari penerimaan kas di masa depan dari deviden atau bunga dan hasil dari penjualan, penarikan, atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman.
3. Mengenai sumber daya ekonomi dari suatu perusahaan, klaim pada sumber daya tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya kepada kesatuan lain dan ekuitas pemilik), dan pengaruh dari transaksi, kejadian dan situasi yang mengubah sumber daya dan klaim kepada sumber daya tersebut.

(SFAC No.1) ^{1930 -> 1970} ~~Statement~~ *Statement of Financial Accounting Concepts* ^{pernyataan konsep}

Sedangkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Secara ringkas, tujuan dari pelaporan keuangan tersebut adalah untuk memberikan: (1) informasi yang berguna dalam keputusan investasi dan kredit, (2) informasi yang berguna dalam menilai prospek arus kas, dan (3) informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim pada sumber daya itu, dan perubahan dalam sumber daya tersebut.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk dapat melakukan evaluasi atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, waktu serta kepastian dari hasil tersebut.

Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode pelaporan. Informasi ini juga berguna untuk menilai kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan arus kas tersebut.

D. Peranan Laporan Keuangan

Laporan-laporan keuangan merupakan kartu angka untuk mencatat dan mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Laporan-laporan keuangan itu juga memberikan dasar untuk memberikan kompensasi kepada para partisipan atau pemegang andil. Bagi pemilik perusahaan, bagian yang penting dari kompensasi mereka adalah peningkatan nilai perusahaan. Tujuan memaksimalkan nilai perusahaan adalah seperti memberikan angka yang paling menentukan dalam suatu permainan yang kompetitif.

Laporan keuangan perusahaan didasarkan aturan-aturan dan konvensi – konvensi akuntansi. Tetapi penilaian suatu perusahaan didasarkan pada proyeksi atau prakiraan dan kinerja dimasa depan. Hal ini melibatkan pemakaian pertimbangan-pertimbangan yang subjektif. Jadi laporan-laporan itu memberikan informasi historis kuantitatif dasar yang merupakan sekumpulan input yang penting yang digunakan dalam menghitung nilai-nilai ekonomis.

Gambaran lengkap tentang aktivitas-aktivitas akuntansi keuangan suatu perusahaan selama satu tahun terdiri dari tiga laporan keuangan dasar, yakni: (J. Fred Weston & Thomas E Copeland, 1995, hal.25)

1. Neraca awal tahun memberikan gambaran tentang perusahaan pada permulaan tahun pajaknya; ditambah neraca akhir tahun yang memberikan gambaran tentang harta dan hutang akhir.
2. Perhitungan laba rugi menunjukkan arus pendapatan dan beban atau biaya selama interval antara neraca awal dan neraca akhir periode.
3. Laporan arus kas merinci sumber-sumber perubahan kas dan ekuivalen kas selama interval waktu yang sama dengan perhitungan rugi laba.

E. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian analisis laporan keuangan:

Analisis laporan keuangan adalah proses penentuan ciri-ciri keuangan dan operasi suatu perusahaan yang diperoleh dari data akuntansi dan laporan keuangan lainnya. (Sarwoko dan Abdul Halim, 1989, hal.49)

2. Tujuan analisis laporan keuangan:

Tujuannya adalah untuk mencapai beberapa tujuan seperti: dapat digunakan sebagai alat *screening* awal dalam memilih alternatif investasi atau merger, sebagai alat *fore casting*, mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang, dan sebagai proses diagnoses terhadap masalah-masalah

manajemen, atau sebagai alat evaluasi terhadap manajemen perusahaan. (Dwi Prastowo D, 1995, hal.31)

Sedangkan menurut Erich A Helfert, DBA analisis laporan keuangan mempunyai tiga tujuan:

- penafsiran informasi keuangan

Di dalamnya terdapat trend analisis proyek arus kas, dan lain-lain . Dalam hal ini akan mengarah kepada suatu analisis arus kas yang dihasilkan perusahaan, dan proyeksi arus ini sebagai indikator prestasi dan nilai ekonomi.

- Penggunaan data komparatif

Bagian ini merupakan bagian yang penting, karena data tersebut membantu menempatkan perspektif penilaian tentang suatu perusahaan atau usaha.

- Analisis pasar keuangan

Menyangkut studi dan proyeksi pola harga saham perusahaan dan para pesaingnya yang berhubungan dengan trend pasar saham.

Jadi analisis keuangan menjadi suatu jembatan antara laporan keuangan yang dipublikasikan yang melaporkan prestasi akuntansi dan trend pasar yang mencerminkan nilai ekonomi perusahaan.

F. Analisis Ratio Laporan Keuangan

1. Pengertian analisis ratio laporan keuangan

Untuk menilai kinerja dan kondisi perusahaan, penganalisis laporan keuangan memerlukan berbagai teknik analisis, salah satu teknis analisis laporan keuangan yang paling banyak digunakan adalah teknik analisis ratio keuangan. Sedangkan pengertian ratio keuangan itu sendiri adalah merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain dari suatu laporan keuangan. (Syafaruddin Alwi, 1974, hal.107)

2. Penggolongan angka ratio analisis laporan keuangan

Tujuan tiap penganalisis laporan keuangan pada umumnya adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan yang bersangkutan, oleh karena itu angka-angka ratio pada dasarnya dapat digolongkan menjadi: (S Munawir, 1992, hal.69)

a) Ratio Likuiditas

Adalah ratio-ratio yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, atau dengan kata lain likuiditas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur jangka pendek.

Perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi maka perusahaan dapat dikatakan dalam keadaan "likuid". (Bambang Riyanto, 1993, hal.18)

Untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan, biasanya digunakan angka ratio sebagai berikut (Dwi prastowo, 1995, hal.57-60)

1. Current Ratio

Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Bagi perusahaan, perhitungan current ratio dapat berguna untuk mengetahui berapa kredit jangka pendek yang boleh ditarik supaya likuiditas perusahaan masih dapat terjaga dengan baik, dan bagi kreditur jangka pendek menunjukkan tingkat keamanan dalam pemberian kreditnya.

Rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100 \%$$

2. Quick Ratio

Dalam pengukuran tingkat likuiditas pada suatu perusahaan, untuk lebih mendapat kepastian yang lebih besar adalah selain dengan current ratio, dapat dilengkapi dengan menggunakan quick ratio.

Quick ratio dihitung dengan mengurangi persediaan dari aktiva lancar dan membandingkan sisanya dengan hutang lancar. Quick ratio dirancang untuk mengukur berapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajibannya, tanpa harus terlalu tergantung pada persediaan. Persediaan tidak bisa sepenuhnya diandalkan, karena persediaan

bukanlah sumber kas yang bisa segera diperoleh, dan bahkan mungkin tidak mudah dijual pada kondisi ekonomi yang lesu.

Rumus:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

b) Ratio Solvabilitas

Adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika dilikuidasikan.

Persoalan yang sering muncul adalah apakah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut cukup untuk memenuhi semua kewajibannya. Dengan demikian perusahaan yang "solvabel" yaitu perusahaan yang mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, demikianpun sebaliknya. (Bambang Riyanto, 1993, hal.25)

Perusahaan yang solvabel belum tentu perusahaan tersebut likuid, demikian juga yang insolvel, belum tentu perusahaan tersebut likuid.

Ada 4 (empat) kemungkinan dalam hubungannya antara likuiditas dengan solvabilitas, yaitu:

- perusahaan yang likuid, tapi insolvel
- perusahaan yang likuid, dan solvabel



- perusahaan yang solvabel, tapi ilikuid
- perusahaan yang insolvel dan ilikuid

Perusahaan yang insolvel dan ilikuid pada suatu waktu akan menghadapi kesukaran finansial, yaitu pada saat kewajibannya mulai jatuh tempo. Pada saat itulah para kreditur mulai melakukan penagihan kepada perusahaan, sedang untuk perusahaan yang insolvel dan likuid tidak akan menghadapi kesukaran finansial, sehingga masih bisa bekerja dengan baik dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki solvabilitasnya. Sedangkan tingkat solvabilitasnya suatu perusahaan dapat dihitung (diukur) dengan ratio sebagai berikut:

1. Ratio total aktiva atas total hutang

Ratio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah aktiva (*total assets*) dengan jumlah hutang.

Rumus:

$$\text{Ratio total aktiva atas Total hutang} = \frac{\text{Total aktiva}}{\text{Total hutang}} \times 100 \%$$

Oleh karena solvabilitas adalah angka perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang, maka setiap penambahan hutang akan menurunkan tingkat solvabilitasnya. Tingkat solvabilitas dapat dipertinggi dengan jalan sebagai berikut:

- menambah aktiva tanpa menambah hutang atau menambah aktiva relatif lebih besar dari pada tambahan hutang.
- Mengurangi hutang tanpa mengurangi aktiva atau mengurangi hutang relatif lebih besar dari pada berkurangnya aktiva.

Dari kedua cara tersebut mengharuskan adanya tambahan modal sendiri. Pada alternatif pertama tambahan modal sendiri ditambahkan pada aktiva, sedangkan pada alternatif kedua tambahan modal sendiri mengurangi atau untuk membayar hutang.

Dengan demikian berarti bahwa sejumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan dijamin dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Ratio minimalnya sebesar 100 % atau sebesar 1 : 1. Jadi perusahaan harus mengusahakan agar tingkat solvabilitasnya diatas 100 %.

2. Dengan membandingkan antara modal sendiri (*net worth*) dengan jumlah hutang

Ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang-hutangnya dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Ratio ini juga menunjukkan adanya nilai lebih (*access value*), yaitu kelebihan aktiva atas hutang. Apabila nilai rasionya semakin besar, maka perusahaan dalam kondisi yang semakin baik atau solvabel, tapi bila prosentase ratio semakin kecil berarti perusahaan semakin cepat insolvel, karena jumlah aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang perusahaan semakin kecil.

3. Ratio dengan membandingkan antara modal sendiri dengan total aktiva
(*total assets*)

Ratio ini menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan (*Margin of Protection*) yang dimiliki oleh kreditur. Semakin tinggi rasionya, hutang (modal pinjaman) yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan semakin kecil. (Munawir S, 1992, hal.82)

Rumus :

$$\text{Proprietary Ratio} = \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

Kalau membandingkan ratio dari tahun ke tahun sering terdapat perbedaan yang disebabkan dari berbagai sumber, yakni:

- akibat perbedaan kebijakan didalam depresiasi
- akibat perbedaan dalam penggantian / penghentian aktiva tetap
- kebijakan dalam hubungannya dengan deviden
- perbedaan dalam kebijakan pembiayaan aktiva

C) Ratio Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan sejumlah modal tertentu.

Bagi suatu perusahaan pada umumnya, masalah rentabilitas lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar belum tentu dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai efisiensi operasi perusahaan.

Efisiensi baru dapat diketahui apabila telah membandingkan antara laba dengan aktiva (kekayaan), ataupun dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.

Secara umum rentabilitas perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rentabilitas} = \frac{\text{Laba}}{\text{Modal (aktiva yang digunakan Untuk menghasilkan laba tersebut)}} \times 100\%$$

Jadi perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah bagaimana meningkatkan rentabilitasnya, bukan hanya mengejar untung / laba yang besar saja. Rentabilitas suatu perusahaan digambarkan oleh beberapa macam angka perbandingan, yakni:

1. *Gross Profit Margin Ratio*

Digunakan untuk mengukur besarnya laba kotor atas setiap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu ratio ini dipengaruhi oleh penjualan dan harga pokok barang yang dijual.

Semakin besar prosentase *Gross Profit Margin* menunjukkan semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal itu menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif semakin lebih rendah bila dibandingkan dengan penjualan, demikian pula sebaliknya jika semakin kecilnya prosentase *Gross Profit margin* menunjukkan semakin buruknya keadaan operasi perusahaan. (Bambang Riyanto, 1993, hal.269)

Rumus:

$$\text{Gross Profit Margin Ratio} = \frac{\text{Penjualan netto} - \text{Harga pokok penjualan}}{\text{Penjualan netto}} \times 100\%$$

2. *Operating Profit Margin Ratio*

Ratio ini menggambarkan apa yang disebut dengan "*pure profit*" yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. *Operating profit* disebut murni (*pure*) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban keuangan perusahaan, berupa bunga serta kewajiban kepada pemerintah berupa pembayaran pajak. (Lukman Syamsuddin, 1985, hal.65)

Rumus:

$$\text{Operating Profit Margin Ratio} = \frac{\text{Laba operasi / usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. Rentabilitas Ekonomis (*Earning Power*)

Merupakan perbandingan antara laba usaha (laba operasi) dengan aktiva usaha (modal sendiri dan modal asing) yang dipergunakan untuk menghasilkan laba dan dinyatakan dalam persentase.

Ratio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan. Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi hanyalah modal yang bekerja dalam perusahaan,

demikian pula laba yang diperhitungkan untuk menghasilkan rentabilitas ekonomis hanyalah laba yang berasal dari usaha / operasi perusahaan, yaitu yang disebut dengan laba usaha / operasi.

Rumus:

$$\text{Rentabilitas Ekonomis} = \frac{\text{Laba usaha / operasi}}{\text{Aktiva usaha}} \times 100 \%$$

Tinggi rendahnya Rentabilitas ekonomis ditentukan oleh dua faktor, yakni:

- *Profit Margin*

Yaitu perbandingan antara laba usaha dengan penjualan

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100 \%$$

- *Turnover of Operating Assets* (Tingkat perputaran aktiva usaha)

Yaitu kecepatan berputarnya aktiva usaha dalam suatu periode tertentu

$$\text{Turnover of Assets} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva rata-rata}} \times 100 \%$$

- Rentabilitas Usaha (Rentabilitas Modal Sendiri)

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba atau keuntungan

Jadi untuk meningkatkan rentabilitas ekonomis dengan jalan memperbesar *profit margin* dan *turnover of assets* ataupun dengan jalan memperbesar kedua-duanya. Untuk memperbesar profit margin adalah sebagai berikut: (Bambang Riyanto, 1993, hal.31)

- a. Dengan menambah biaya usaha sampai tingkat tertentu, diusahakan adanya tambahan penjualan sebesar-besarnya. Dengan kata lain tambahan penjualan lebih besar dari pada tambahan biaya usaha. Perubahan besarnya penjualan dapat disebabkan:
 - memperbesar volume penjualan pada tingkat harga tertentu
 - menaikkan harga / unit produk
- b. Dengan mengurangi pendapatan dipenjualan sampai tingkat tertentu, diusahakan adanya pengurangan biaya usaha yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain pengurangan biaya usaha relatif lebih besar dari pada pengurangan pendapatan dari penjualan.

Cara untuk memperbesar *turnover of assets* yaitu:

- a. Dengan menambah modal usaha sampai tingkat tertentu diusahakan mencapai tambahan penjualan yang sebesar-besarnya.
- b. Dengan mengurangi penjualan sampai tingkat tertentu diusahakan terjadi penurunan operating assets sebesar-besarnya.

F. Penilaian Kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 198/KMK.016/1998

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.740/KMK.00/89, yang dimaksud dengan penilaian kinerja BUMN adalah penilaian terhadap efisiensi dan produktivitas perusahaan yang dilakukan secara berkala atas dasar laporan manajemen dan laporan keuangan, dimana hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan penggolongan tingkat kesehatan BUMN. (SK Menteri Keuangan RI No.740/KMK.00/1989)

Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992 mengubah penggolongan tingkat kesehatan dari Keputusan Menteri Keuangan No.740/KMK.00/1989, menjadi sebagai berikut:

- Sehat sekali, yaitu perusahaan yang bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka diatas 110.
- Sehat, yaitu perusahaan yang bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka 100 sampai dengan 110.
- Kurang Sehat, yaitu perusahaan yang bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka 90 sampai dengan 100.
- Tidak sehat, yaitu perusahaan yang bobot kinerja tahun terakhir menunjukkan angka dibawah atau kurang dari 90.

Nilai bobot perusahaan didasarkan atas rentabililitas, likuiditas, dan solvabilitas dari tahun ke tahun dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Rentabilitas dihitung dari laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata modal yang digunakan (*Capital Employed*) dalam tahun bersangkutan. Modal rata-rata yang digunakan adalah rata-rata aktiva lancar ditambah aktiva tetap netto termasuk penyertaan pada awal tahun dan akhir tahun.
- b. Likuiditas dihitung dari aktiva lancar dibagi dengan pasiva lancar.
- c. Solvabilitas dihitung dari jumlah aktiva dibagi dengan jumlah hutang.

Selain faktor-faktor tersebut terdapat indikator tambahan yaitu faktor penilaian atas produktivitas yang disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha masing-masing perusahaan.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali sistem penilaian kinerja BUMN yang dapat mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan dengan memperhatikan kaedah penilaian kesehatan perusahaan yang berlaku umum. Oleh karena itu keluarlah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.198/KMK.016/1998 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan Berdasarkan Surat Keputusan tersebut tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi:

- a. **Sehat**, yang terdiri dari:

AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95

AA apabila $80 < TS \leq 95$

A apabila $65 < TS \leq 80$

b. **Kurang Sehat**, yang terdiri dari:

BBB apabila $50 < TS \leq 65$

BB apabila $40 < TS \leq 50$

B apabila $30 < TS \leq 40$

c. **Tidak Sehat**, yang terdiri dari:

CCC apabila $20 < TS \leq 30$

CC apabila $10 < TS \leq 20$

C apabila $TS \leq 10$

Sedangkan tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian : aspek Keuangan, aspek Operasional, dan aspek Administrasi.

Dalam penilaian aspek keuangan, indikator yang dinilai serta bobot-bobotnya adalah sebagai berikut:

Indikator	Bobot
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	15
3. Rasio Kas	5
4. Rasio Lancar	5
5. Collectoin Periods	5
6. Perputaran Persediaan	5

7. Perputaran Total Asset	5
8. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	5
Total Bobot	70

Adapun fungsi penilaian daripada indikator-indikator tersebut untuk mengukur tingkat kesehatan finansial perusahaan, pada akhirnya merupakan salah satu pijakan dalam menilai kinerja perusahaan tersebut, dalam hal ini adalah BUMN.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah studi kasus dengan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas dalam obyek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian
 - a. Kepala bagian keuangan
 - b. Kepala bagian umum
 - c. Kepala bagian akuntansi
 - d. Staf yang ditunjuk
2. Objek penelitian
 - a. Gambaran umum perusahaan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan.
 - b. Jenis Usaha Perusahaan.

- c. Neraca perusahaan per 31 Desember 1994 sampai dengan 31 Desember 1996.
- d. Laporan laba rugi perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 1994 sampai dengan 31 Desember 1996.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 1999 sampai dengan bulan April 1999.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di "**Perum Perhutani Unit III Jawa Barat**" dan di kota "**Bandung**".

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan orang yang mengetahui tentang objek penelitian atau yang terlibat langsung pada perusahaan. Dalam hal ini diadakan tanya jawab dengan Kepala Bagian Keuangan Perusahaan dan karyawan perusahaan tersebut.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti, yang meliputi: Neraca perusahaan per 31 Desember

1994 sampai dengan tahun 1996, serta laporan Laba / Rugi perusahaan yang berakhir 31 Desember 1994 sampai dengan tahun 1996. Tujuannya adalah agar penulis memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan melihat catatan-catatan yang tersedia pada perusahaan yang ada hubungannya dengan penelitian antara lain: catatan tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, catatan tentang struktur organisasi perusahaan, catatan tentang bagian-bagian yang ada pada perusahaan dan catatan-catatan pendukung lainnya.

E. Data Yang Diperlukan

Data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum perusahaan yang meliputi: sejarah perusahaan, struktur organisasinya, dan lain sebagainya.
2. Neraca perusahaan tahun 1994 sampai dengan tahun 1996
3. Laporan Laba / Rugi perusahaan dari periode yang berakhir pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1996

F. Definisi Operasionil

1. Analisa Rasio Keuangan adalah metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi.
2. Imbalan kepada pemegang saham (*Return on Equity*) adalah rasio antara modal dan saham. ROE menunjukkan seberapa besar manajemen mampu meningkatkan kekayaan pemegang saham.
3. Imbalan Investasi (*Return on Investment*) digunakan untuk menghitung berapa besar kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto.
4. Rasio Kas (*Cash Ratio*) adalah kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan.
5. Rasio lancar (*Current Ratio*) adalah kemampuan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar.
6. Perputaran piutang (*Collection Periods*) adalah periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang.
7. Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*) adalah kemampuan dana yang tertanam dalam *inventory* berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari *inventory* dan tendensi untuk adanya "overstock".

8. Perputaran total asset (Total Asset Turnover) adalah kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan "revenue".
9. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva merupakan perbandingan antara modal sendiri dan total aktiva , rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditur.
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/016/1998 merupakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
11. Kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dicerminkan dari tingkat kesehatan perusahaan.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data akan digunakan dua cara teknik analisis yaitu dengan analisis rasio keuangan dan analisis yang dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan indikator-indikator penilaian, yaitu dengan cara membandingkan hasil perhitungan ratio keuangan perusahaan dengan kriteria kinerja BUMN menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998.

Digunakannya kedua cara teknik analisis tersebut dimaksudkan agar hasil analisis dapat lebih memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi dan kinerja perusahaan yang dianalisa.

1. Analisis rasio laporan keuangan Berdasarkan SK Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998.

Analisis ratio laporan keuangan ini untuk menjawab masalah yaitu masalah 1(satu), digunakan teknik analisis ratio laporan keuangan, yang terdiri dari:

- a. Imbalan Kepada Pemegang Saham / *Return on Equity* (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

- b. Imbalan Investasi (ROI)

Rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

- c. Rasio Kas / *Cash Ratio*

Rumus:

$$\text{CashRatio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

- d. Rasio Lancar / *Current Ratio*

Rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

- e. Collection Period

Rumus:

$$\text{Collection Period} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

f. Perputaran Persediaan

Rumus:

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

g. Perputaran Total Asset

Rumus:

$$\text{Perputaran Total Asset} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

h. Ratio Total Modal Sendiri

Rumus:

$$\text{Ratio Total Modal Sendiri} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

2. Analisis Laporan Keuangan dalam menilai kinerja perusahaan.

Analisis ini digunakan untuk menjawab masalah no.1 (satu), yaitu mengetahui kinerja perusahaan yang dicerminkan dengan tingkat kesehatan perusahaan untuk tahun terakhir. Langkah-langkah analisis dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian indikator-indikator tersebut diatas. Untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut, berikut ini adalah standar bobot penilaian kinerja perusahaan jika dilihat berdasarkan aspek keuangan:

- a. dengan menilai bobot dari jenis-jenis indikator kinerja perusahaan yang terdiri dari :

- Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE), dengan maksimal bobotnya sebesar 20.
 - Imbalan Investasi (ROI), dengan maksimal bobotnya sebesar 15.
 - Rasio Kas, dengan maksimal bobotnya sebesar 5.
 - Rasio Lancar, dengan maksimal bobotnya sebesar 5.
 - Collection Periods, dengan maksimal bobotnya sebesar 5.
 - Perputaran Persediaan, dengan maksimal bobotnya sebesar 5.
 - Perputaran Total Asset, dengan maksimal bobotnya sebesar 5.
 - Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva, dengan maksimal bobotnya sebesar 10.
 - Total keseluruhan indikator tersebut maksimal sebesar 70.
- b. Setelah menjumlahkan seluruh bobot dari indikator-indikator tersebut, maka dapatlah diketahui nilai dari kinerja perusahaan tersebut. Dalam hal ini terbatas pada aspek keuangannya (*financial*) saja. Atau dengan kata lain, penjumlahan dari indikator-indikator tersebut merupakan besarnya kinerja perusahaan yang dicerminkan dari kesehatan keuangan (*financial*) perusahaan itu sendiri.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Dalam dekade tahun 1945 sampai dengan 1947, karena keadaan politik pada waktu itu tidak memungkinkan, Jawatan Kehutanan hanya menjalankan tugasnya di Sumatra dan Jawa saja dengan susunan organisasi yang sangat sederhana.

Pimpinan Jawatan Kehutanan di Jawa Barat pada waktu itu adalah R.O. Nurhadi yang diangkat sebagai Inspektur Kehutanan Bagian I Bandung dengan surat ketetapan Menteri Departemen Kemakmuran tanggal 24 Oktober 1945 No. 735/A/Keh. Pada masa revolusi itu tugas pokok Jawatan Kehutanan adalah turut mempertahankan de facto Republik Indonesia dan menyelamatkan harta kekayaan negara bersama militer dan pemerintahan sipil lainnya.

Tahun 1947 di Jawa Barat terbentuk negara pasundan, dan Instansi Kehutanan berubah menjadi *De Dienst van Boswezen van* negara Pasundan yang dipimpin oleh Ir. C.Y. Moel sampai dengan tahun 1949. Pada tahun itu juga, kehutanan mulai disusun secara federatif. Dan pada pertengahan tahunnya dibentuk suatu bagian baru yang disebut Planologi Kehutanan yang terpisah dari pengelolaan, dipimpin oleh R.H. Odang Prawiradiredja sampai tahun 1952.

Pada tahun 1951 terbit Surat Keputusan Jawatan Kehutanan tertanggal 17 Nopember 1951 Nomor 4212 yang memutuskan bahwa terhitung 1 September

1951, dibentuk Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat ditetapkan sebagai Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat yang dipimpin oleh R. Oesman Nandika.

Peraturan Pemerintah Nomor 20/1952 menetapkan Kehutanan di Jawa / Madura dibagi-bagi menjadi beberapa Inspeksi Kehutanan Bagian I. Bertindak sebagai Inspektur waktu itu adalah R. Koesnowarso, tetapi tidak lama kemudian diganti M. Saroso.

Pada tahun 1953, Kepala Jawatan Kehutana dengan Surat Keputusan Tanggal 1 Oktober 1953 Nomor 17777/KD/1/5 mengukuhkan susunan organisasi setiap inspeksi, sehingga mempertegas garis komando dan koordinasi.

Oleh karena pada tahun 1954 M. Saroso meninggal dunia, R. Oesman Nandika yang semula menjabat Kepala Brigade I Planologi Jawa Barat dialih tugaskan menjadi Inspektur Jawatan Kehutana Bagian I Jawa Barat dan Kepala Brigade I Planologi Kehutanan dijabat oleh Adang Durachman.

Pada tahun 1957 terbit Peraturan Pemerintah No. 64/1957 menetapkan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat pada daerah-daerah Swatantra Tingkat I. Maka berubahlah status Inspeksi Kehutanan Bagian I Jawa Barat menjadi Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat. R. Oesman Nandika selaku Kepala Dinas pertama yang menduduki jabatan itu sampai masa pensiunnya tahun 1964, digantikan oleh Adang Durachman sampai tahun 1971.

Pada tahun 1971 sampai dengan Mei 1974 Dinas Kehutanan Propinsi Tingkat I Jawa Barat dipimpin oleh Ir. Sulaeman Partadisastra yang selanjutnya digantikan oleh Rd. Usman Mu'min Bsc.F. sebagai Pejabat Kepala Dinas Definitif sampai akhir Februari 1978.

Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat selama periode 1964 – 1971 mengalami dua kali pergantian pimpinan, yaitu Ir. Yunus Kartasubrata dan Andi Abdul Rifa'i yang selanjutnya digantikan oleh Ir. M. Simbolon pada awal tahun 1974.

Pada awal tahun 1978 status Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berubah menjadi Unit III Perum Perhutani Unit III Perum Perhutani Jawa Barat dengan Kepala Unit yang pertama Ir. Suherman Buhron.

Pada waktu yang sama, Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat pun dilebur kedalam Perum Perhutani menjadi Biro Perencanaan Unit III Perum Perhutani Jawa Barat.

2. Dasar Pendirian

Perum Perhutani Unit III Jawa Barat didirikan pada tanggal 10 Februari 1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1978, menarik kembali urusan bidang kehutanan yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

Dengan berdirinya Perum Perhutani Unit III maka untuk selanjutnya segala hak dan kewajiban kekayaan serta perlengkapan dari Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat beralih kepada Perum Perhutani.

Dalam perkembangan selanjutnya sejak tanggal 23 Agustus 1986 peraturan pengurusannya diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986.

3. Tugas dan Sifat Usaha

Perum Perhutani mengemban tugas mengelola hutan negara sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah:

- a. Tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. (Ps.5 ayat 1 PP No.36 th.1986)
- b. Sifat usaha perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Ps.5 ayat 1 PP No.36 th.1986)

4. Misi, Filosofi dan Tujuan

Misi Perum Perhutani seperti digariskan dalam PP Nomor 36/Th.1986 pasal 5 (2), adalah menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan yang berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta untuk turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Misi tersebut diselenggarakan atas dasar falsafah:

- a. Pembangunan kehutanan melalui pengusahaan hutan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- b. Kelestarian sumber daya hutan, keuntungan perusahaan dan kesejahteraan karyawan serta masyarakat.

Tujuan Perum Perhutani, memantapkan ketahanan perusahaan melalui:

- a. Terjaminnya kelestarian sumber daya hutan (*sustainability*)
- b. Peningkatan kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan yang optimal (*profitability*)
- c. Peningkatan peranan Perum Perhutani dalam pembangunan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan hutan (*prosperity*), dan peningkatan kualitas lingkungan.

5. Susunan Organisasi, Pimpinan Tugas Pokok dan Tata Kerja

Susunan organisasi, tugas pokok dan tata kerja Perum Perhutani diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara Nomor.313/Kpts/Dir/1989. Pimpinan unit Perum Perhutani dipimpin oleh suatu Pimpinan Unit dan seorang Wakil Kepala Unit.

Adapun Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala unit adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit bertugas melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi.
2. Kepala Unit memimpin dan mengurus Unit Perum Perhutani yang ditugaskan oleh Direksi.
3. Kepala Unit menentukan cara-cara pelaksanaan kebijakan Direksi Perum Perhutani guna mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Sedangkan tugas wewenang dan tanggung jawab Wakil Kepala Unit adalah:

1. Membantu Kepala Unit dalam melaksanakan tugas-tugas memimpin dan mengurus Unit yang ditugaskan oleh Kepala Unit.
2. Mengkoordinasi, membina dan mengawasi bidang-bidang pembinaan hutan, produksi, industri, keamanan, hukum, perlengkapan dan perkantoran.
3. Apabila Kepala Unit berhalangan, Wakil Kepala Unit bertindak mewakili Kepala Unit mengenai tugas-tugas yang menyangkut hal-hal rutin.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
5. Dalam Melaksanakan tugasnya, Wakil Kepala Unit bertanggung jawab kepada Kepala Unit.



Perum Perhutani III Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Unit, dibantu oleh seorang Wakil Kepala Unit dan 9 (sembilan) Kepala Biro yang masing-masing adalah:

1. Biro Perencanaan
2. Biro Pembinaan Hutan
3. Biro Produksi
4. Biro Industri
5. Biro Pemasaran
6. Biro Keuangan
7. Biro umum
8. Biro Teknik dan Perlengkapan
9. Biro Keamanan dan Agraria

A. Biro Perencanaan

1. Pimpinan:

Biro Perencanaan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan.

2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Biro perencanaan adalah membantu Kepala Unit dalam bidang Perencanaan:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan Biro Perencanaan meliputi, pengukuhan, penataan hutan, pembukaan wilayah, pengukuran perpetaan, perencanaan dan pengembangan, perisalahan.
 - b. Memeriksa dan menilai RPKH, RKT yang disusun oleh KSPHD.

- c. Memeriksa dan menilai RKTP yang disusun dan diajukan oleh KPH.
 - d. Menyusun RKTP.
 - e. Menyusun perangkaan, membuat analisa, evaluasi dan laporan bidang perencanaan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
 - g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.
3. Susunan Biro Perencanaan terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan umum
 2. Seksi Pengukuran dan Perpetaan
 3. Seksi Perencanaan Prasarana
 4. Seksi Perencanaan Hutan

B. Biro Pembinaan Hutan

1. Pimpinan

Biro Pembinaan Hutan dipimpin oleh Kepala Biro Pembinaan Hutan.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Biro Pembinaan Hutan adalah membantu Kepala Unit dalam bidang Pembinaan Hutan:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan Biro Pembinaan hutan meliputi reboisasi, rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hutan.
 - b. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan sarana dan prasarana teknis.
 - c. Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan petunjuk kerja kepada Administratur Perhutani / KKPH.

- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan reboisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan hutan fisik di lapangan.
 - e. Memonitor dan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pembinaan hutan oleh KPH.
 - f. Menyampaikan masalah-masalah bidang pembinaan hutan dan saran pemecahannya kepada Kepala Unit.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Unit.
 - h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.
3. Susunan Biro Pembinaan Hutan terdiri dari:
 - a. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan.
 - b. Seksi Pembinaan Lingkungan.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Biro Pembinaan Hutan dibantu oleh staf Teknis dan Staf Tata usaha.

C. Biro Produksi

1. Pimpinan
Biro Produksi dipimpin oleh Kepala Biro Produksi.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Biro Produksi adalah membantu Kepala Unit dalam bidang produksi:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan Biro produksi meliputi kegiatan eksploitasi hutan dan usaha-usaha lain.

- b. Menyusun rencana kerja dan kebutuhan sarana, prasarana teknis bidang produksi.
 - c. Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan petunjuk kerja bidang produksi kepada Administratur Perhutani / KKPH.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan produksi fisik di lapangan.
 - e. Memonitor dan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan produksi oleh Administratur Perhutani / KKPH.
 - f. Menyampaikan masalah-masalah bidang produksi dan saran pemecahannya kepada Kepala Unit.
 - g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.
3. Susunan Biro Produksi terdiri dari:
 - a. Seksi Eksploitasi Kayu.
 - b. Seksi Eksploitasi Non Kayu.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Biro Produksi dibantu oleh Staf Teknis dan Staf Tata Usaha.

D. Biro Industri

1. Pimpinan

Kepala Biro Industri dipimpin oleh Kepala Biro Industri.

2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Biro Industri adalah membantu Kepala Unit dalam bidang Industri:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan Biro Industri meliputi hasil hutan kayu dan non kayu dalam usahanya memperoleh nilai tambah yang optimal.
 - b. Menyusun rencana sarana dan prasarana yang diperlukan.
 - c. Mengatur, membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi seksi-seksi dalam satuan kegiatan pada Biro Industri.
 - d. Memberikan bimbingan, petunjuk kerja, dan melaksanakan pengawasan kepada Administratur / KKPH.
 - e. Menyusun perangkaan, membuat analisa, evaluasi dan laporan.
 - f. Memecahkan persoalan-persoalan dalam bidangnya.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
 - h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.
3. Susunan Biro Industri terdiri dari:
 - a. Seksi Industri Kayu
 - b. Seksi Industri Non Kayu
 - c. Kesatuan Industri Pengolahan Kayu
 - d. Kesatuan Pengusahaan Sutera Alam
 - e. Kegiatan Industri Kayu dan Non Kayu lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Biro Industri dibantu oleh Staf Teknis dan Staf Tata Usaha.

E. Biro Pemasaran

1. Pimpinan

Biro Pemasaran dipimpin oleh Kepala Biro Pemasaran.

2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Biro Pemasaran adalah membantu Kepala Unit dalam bidang pemasaran:

- a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan Biro Pemasaran meliputi penjualan, pengujian dan analisa pasar bagi hasil hutan kayu dan non kayu.
- b. Memberikan masukan bagi pengembangan industri pengolahan hasil hutan dalam negeri.
- c. Menyusun rencana sarana dan prasarana yang diperlukan.
- d. Mengatur, membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas seksi-seksi pada Biro Pemasaran.
- e. Memberikan bimbingan, petunjuk kerja dan melaksanakan pengawasan kepada Administratur / KKPII.
- f. Menyusun perangkaan, membuat analisa, evaluasi dan laporan.
- g. Memecahkan persoalan-persoalan dalam bidangnya.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
- i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.

3. Susunan Biro Pemasaran terdiri dari:

- a. Seksi Penjualan
- b. Seksi Pengujian

- c. Seksi Analisa Pasar
- 4. Dalam melaksanakan tugas sehari-harinya Kepala Biro Pemasaran dibantu oleh Staf Teknis dan Staf Tata Usaha.

F. Biro Keuangan

1. Pimpinan

Biro Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro Keuangan.

- 2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Biro Keuangan adalah membantu Kepala Unit dalam bidang keuangan:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan Biro Keuangan, antara lain menyusun Konsep Pedoman kerja, JUKKLAK dan JUKNIS bidang Keuangan, Akuntansi dan bidang Data dengan berpedoman kerja JUKKLAK dan JUKNIS yang disusun Direksi.
 - b. Menyusun rencana operasional dan rencana anggaran belanja Biro Keuangan.
 - c. Bertindak sebagai Bendaharawan Umum Keuangan Unit.
 - d. Melaksanakan Pembelanjaan Perusahaan berdasarkan anggaran dan peraturan pembelanjaan serta Pedoman Kerja, JUKKLAK dan JUKNIS dari Direksi serta melaksanakan pengelolaan Data, penyajian informasi dan Manajemen Akuntansi.
 - e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seluruh unit berpedoman kepada instruksi dari Direksi.

- f. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Unit mengenai pemberian pinjaman, pengeluaran dan penerimaan perusahaan.
 - g. Mengadakan pemantauan, pemeriksaan, penilaian terhadap pelaksanaan pembelanjaan perusahaan oleh penanggung jawab keuangan yang ditunjuk berdasarkan anggaran, peraturan perbendaharaan, prinsip akuntansi, pedoman kerja, JUKKILAK dan JUKNIS dari Direksi.
 - h. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Biro Keuangan dan membantu menyusun Laporan Perusahaan untuk wilayah unit.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Unit.
 - j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.
3. Susunan Biro Keuangan terdiri dari:
- a. Seksi Anggaran dan Pembelanjaan
 - b. Seksi data dan Informasi
 - c. Seksi Akuntansi
4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Biro Keuangan dibantu oleh Staf Teknis dan Staf Tata Usaha.

G. Biro Umum

1. Pimpinan

Biro Umum dipimpin oleh Kepala Biro Umum

2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Biro Umum adalah membantu Kepala Unit dalam bidang umum:
 - a. Memimpin, mengatur dan mengendalikan kegiatan, tatalaksana umum Kantor Unit.
 - b. Menyusun rencana sarana dan prasarana bidang umum.
 - c. Mengatur, membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi tugas seksi-seksi pada Biro umum.
 - d. Memberikan bimbingan, petunjuk kerja dan melaksanakan pengawasan kepada Administratur / KKPH dan lainnya dalam pengurusan bidang tersebut.
 - e. Menyusun perangkaan, membuat analisa, evaluasi dan laporan.
 - f. Memecahkan persoalan-persoalan dalam bidangnya.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Kepala Unit.
 - h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.
3. Susunan Biro Umum terdiri dari:
 - a. Seksi Umum / Perkantoran
 - b. Seksi Personalia
4. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Kepala Biro umum dibantu oleh Staf Teknis dan Staf Tata Usaha.

3. Susunan Biro Teknik dan Perlengkapan terdiri dari:
 - a. Seksi Bangun-bangunan
 - b. Seksi Instalasi
 - c. Seksi Perlengkapan
4. Dalam menjalankan tugas sehari-hari Kepala Biro Teknik dan Perlengkapan dibantu oleh Staf teknis dan Staf Tata Usaha.

I. Biro Keamanan dan Agraria

1. Pimpinan

Biro Keamanan dipimpin oleh Kepala Biro Keamanan dan Agraria.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Biro Keamanan dan Agraria adalah membantu Kepala Unit dalam bidang Hukum Keamanan, Keagrariaan dan Kehumasan:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan kegiatan Biro Keamanan dan Agraria dalam usaha pengamanan hutan dan urusan agraria, hukum dan kehumasan.
 - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan.
 - c. Mengatur, membimbing, mengkoordinasi dan mengawasi tugas seksi-seksi pada Biro Keamanan dan Agraria.
 - d. Memberikan bimbingan, petunjuk kerja dan melaksanakan pengawasan kepada Administratur / KKPH dalam pengurusan bidang keamanan, keagrariaan, kehumasan dan hukum.

- e. Menyusun perangkaan, membuat analisa, evaluasi dan laporan.
 - f. Memecahkan persoalan-persoalan bidang keamanan, keagrariaan.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
 - h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit.
3. Susunan Biro Keamanan dan Agraria:
 - a. Seksi Keamanan
 - b. Seksi hukum dan Agraria
 - c. Seksi Humas
 4. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Biro Keamanan dan Agraria dibantu oleh Staf Teknis dan Staf Tata Usaha.

Untuk selanjutnya pembagian wilayah kerja Unit kedalam Kesatuan Pemangkuan Hutan ditetapkan oleh Menteri atas usul Direksi. Wilayah kerja Unit III Jawa Barat terbagi dalam 14 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), yang masing-masing dipimpin oleh Administratur Perhutani / Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKP).

Keempat belas KPH tersebut dibagi-bagi lagi menjadi 107 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten Perhutani/Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (Asper/KBKPH). Wilayah terkecil di bawah BKPH adalah Pesort Polisi Hutan (RPH), untuk seluruh unit III berjumlah 382, masing-masing dipimpin oleh Kepala Resoert

Polisi Hutan (KRPH) atau sebutan umum Mantri Kehutanan yang dibantu oleh beberapa orang Mandor.

6. Lambang Perum Perhutani

Dengan Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani 18 Nopember 1981 No. 1116/Kpts/Dir/1981 telah ditetapkan lambang Perum Perhutani yang baru seperti tertera pada lembar lampiran.

Penjelasan lambang yang baru tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lambang berbentuk lingkaran yang di dalamnya terdiri dari :
 1. Gambar bentuk pohon pada bagian sebelah kiri lingkaran,
 2. Jelai padi dengan 17 butir pada bagian bawah kanan lingkaran,
 3. Masyarakat dalam bentuk seorang ayah, ibu, dan anak pada bagian kanan lingkaran.
- b. Warna Lambang
 1. Warna dasar lingkaran adalah putih,
 2. Pohon berwarna hijau dengan pinggiran serta bayangan berwarna hitam,
 3. Jelai padi berwarna kuning dengan pinggiran dan bayangan berwarna hitam.
- c. Tulisan Perum Perhutani terletak di luar lingkaran di sebelah bawah bagian tengah dengan jenis huruf pascal.
- d. Arti lambang sepenuhnya adalah:

Perum Perhutani bertugas mengelola hutan dan kehutanan dengan sebaik-baiknya bagi sebesar-besar kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Pengertian itu dilambangkan dalam bentuk:

1. Pohon sebagai lambang Hutan dan Kehutanan dengan warna hijau yang melambangkan hutan yang subur serta terpelihara baik,
 2. Jelai padi berwarna kuning yang melambangkan kesejahteraan/kemakmuran,
 3. Gambar ayah, ibu, dan anak yang melambangkan masyarakat yang sejahtera, baik untuk masa kini maupun untuk masa depan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- e. Lambang ini tidak dipergunakan untuk merk dagang (*trade merk*) Perum Perhutani yang bentuknya telah ditetapkan sendiri.

Lambang baru Perum Perhutani ini berlaku sejak tanggal 18 Nopember 1981.

7. Produksi Hasil Hutan

a. Hasil Hutan Kayu

Hasil hutan utama yang dihasilkan di Jawa Barat adalah kayu sepeerti : Jati, Rasamala, Pinus, Mahoni, Damar, dan jenis kayu lainnya yang diperoleh dari tebang habis maupun tebang penjarangan.

b. *Hasil Hutan Non Kayu*

Dalam rangka penganekaragaman produksi hasil hutan serta mengurangi ketergantungan akan hasil hutan berupa kayu, maka pemanfaatan hasil hutan non kayu yang utama adalah: getah pinus, getah damar, dan daun kayu putih.

Disamping kayu pertukangan dihasilkan juga kayu bakar dan arang dengan memanfaatkan sisa tebangan yang tidak bisa dijadikan kayu perkakas, atau jenis kayu yang memang khusus diperuntukkan kayu bakar.

Jauhnya jarak angkutan serta beratnya medan mengakibatkan sebagian sisa tebangan tidak dapat dimanfaatkan karena biayanya terlalu tinggi. Sebagai jalan keluarnya kayu bakar tersebut diproses menjadi arang, dengan terlebih dahulu dibukukan sebagai pencrima kayu bakar.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

A. Deskripsi Data

Data utama yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan dan laporan-laporan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dikemukakan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari hasil penelitian di Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Penelitian ini akan mengetahui kondisi keuangan perusahaan atau menilai tingkat kesehatan perusahaan yang dilihat dari aspek keuangannya selama tiga periode akuntansi atau tiga tahun terakhir yaitu meliputi laporan keuangan tahun 1994 sampai dengan tahun 1996.

Data keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahun 1994 sampai dengan 1996, yang terdiri dari:

- Neraca per 31 Desember 1994, tahun 1995, dan tahun 1996
- Laporan Laba dan Rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 1994, tahun 1995, dan tahun 1996

Data keuangan yang berupa Neraca serta laporan laba dan rugi dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996, berturut-turut dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 1
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
NERACA
 Per 31 Desember 1994

No	Nama rekening	Saldo	No	Nama Rekening	Saldo
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN DAN MODAL	
1	Kas dan Bank	6,417.851.594	18	Hutang Pajak	1,283.472.052
2	Surat Berharga (Investasi Sementara)	-	19	Kewajiban lain kepada negara	639.143.317
3	Piutang usaha	3,572.631.943	20	Hutang Usaha	2,023.571.962
	Penyisihan Kerugian Piutang Usaha	(85.993.201)	21	Biaya yang masih harus dibayar	2,654.792.631
4	Piutang Lain-lain	103.673.291	22	Premi produksi yang masih harus dibayar	1,614.346.515
	Penyisihan Kerugian Piutang Lain-lain	(20.694.843)	23	Hutang jasa produksi	42.247.917
5	Uang Muka Karyawan/Pelaksana Kerja/Pihak III	179.524.624	24	Uang muka penjualan hasil hutan	180.284.732
6	Pendapatan yang masih akan diterima	9.651.467	25	Kewajiban lancar lainnya	73.894.687
7	Persediaan hasil hutan	7.728.572.324		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	8,511,753,813
8	Persediaan Perlengkapan Hutan	462.519.802		HUTANG JANGKA PANJANG	
9	Biaya Dibayar Dimuka	459.213.668	26	Hutang jangka panjang luar negeri	2.826.411
10	Pembayaran dimuka pembangunan / HKM	-	27	Hutang jangka panjang lainnya	6.249.761
11	Uang Muka Pajak	172.893.510	28	Hutang dana sisa laba	962.173.468
	TOTAL AKTIVA LANCAR	18,989,844,184	29	Hutang potongan karyawan	62.541.876
	AKTIVA TETAP BERWUJUD			TOTAL HUTANG JANGKA PANJANG	4,033,791,516
12	Aktiva tetap harga perolehan	65.215.096.864			
	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	(30.564.231.687)			
	TOTAL AKTIVA TETAP BERWUJUD	34,650,865,177			
	INPRES REBOISASI DAN PENGADAAN BIBIT				
13	Inpres Reboisasi dan Pengadaan bibit	26.879.354		LABA / RUGI	
	TOTAL INPRES.REB. DAN PENGADAAN BIBIT	26,879,354	31	Laba tahun berjalan	2.761.439.997
	AKTIVA LAIN-LAIN			TOTAL LABA / RUGI	2,761,439,997
14	Piutang jangka Panjang	998.725.462		TOTAL CADANGAN	
15	Beban yang ditangguhkan	2,549.867.236		TOTAL MODAL DAN CADANGAN	
16	A.T yang dipergunakan oleh Pihak III	9.620.145			
	Ak.pen.y. A.T yang dipergunakan Pihak III	(8.105.924)			
17	Aktiva Tetap yang berwujud yang akan dihapus	1,524.932,257	32	Rekening antar kantor	2,934.628.974
	Ak.pen.y. A.T yang akan dihapus	(1.524.932,257)	33	Rekening penutup	41,992.293,182
	TOTAL AKTIVA LAIN-LAIN	3,566,318,767		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	57,233,907,482
	TOTAL AKTIVA	57,233,907,482			

Tabel V.2
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
LAPORAN LABA/RUGI
Per 31 Desember 1994

No	URAIAN	SALDO
1	PENDAPATAN	
a	Penjualan	70,289,350,535
b	Penyerahan hasil hutan	9,812,764,661
c	Jumlah Pendapatan (a + b)	80,102,115,196
2	HARGA POKOK PENDAPATAN	58,673,194,258
3	LABA/RUGI KOTOR (1 - 2)	21,428,920,934
4	BIAYA USAHA	
a	Biaya Pemasaran	1,010,775,275
b	Biaya Umum	18,284,996,234
c	Jumlah Biaya Usaha (a + b)	19,295,771,509
5	LABA/RUGI USAHA (3 - 4)	2,133,149,429
6	HASIL DAN BIAYA DILUAR USAHA POKOK	
a	hasil diluar usaha pokok	2,571,873,291
b	Biaya diluar usaha pokok	1,943,582,723
c	Jumlah hasil dan biaya diluar usaha pokok	628,290,568
7	LABA SEBELUM PAJAK	2,761,439,997
8	PAJAK PENGHASILAN BADAN	
9	LABA SETELAH PAJAK	2,761,439,997

Tabel 2
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
NERACA
 Per 31 Desember 1995

No	Nama rekening	Saldo	No	Nama Rekening	Saldo
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN DAN MODAL	
1	Kas dan Bank	7,146,529,321	18	Hutang Pajak	1.457.931,672
2	Surat Berharga (Investasi Sementara)	500,000,000	19	Kewajiban lain kepada negara	599.431.621
3	Piutang usaha	2,834,694,572	20	Hutang Usaha	1.732.675,823
	Penyisihan Kerugian Piutang Usaha	(87,672,821)	21	Biaya yang masih harus dibayar	3.076.943,881
4	Piutang Lain-lain	136,472,892	22	Premi produksi yang masih harus dibayar	1,937,564,899
	Penyisihan Kerugian Piutang Lain-lain	(22,761,783)	23	Hutang jasa produksi	60.998,679
5	Uang Muka Karyawan/Pelaksana Kerja/Pihak III	232,654,127	24	Uang muka penjualan hasil hutan	210.343,661
6	Pendapatan yang masih akan diterima	12,540,247	25	Kewajiban lancar lainnya	44.692,381
7	Persediaan hasil hutan	9,876,532,019		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	9,120,582,637
8	Persediaan Perlengkapan Kerja	521,462,983		HUTANG JANGKA PANJANG	
9	Biaya Dibayar Dimuka	548,975,624	26	Hutang jangka panjang luar negeri	2.826.411
10	Pembayaran dimuka pembangunan / HKM	1,320,554,426	27	Hutang jangka panjang lainnya	5.231,482
11	Uang Muka Pajak	542,169,372	28	Hutang dana sisa laba	1.035.469,740
	TOTAL AKTIVA LANCAR	23,562,151,479	29	Hutang potongan karyawan	82.638,445
	AKTIVA TETAP BERWUJUD			TOTAL HUTANG JANGKA PANJANG	1,126,166,078
12	Aktiva tetap harga perolehan	73,031,199,504		LABA / RUGI	
	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	(34,760,776,154)	31	Laba tahun berjalan	4,351,136,887
	TOTAL AKTIVA TETAP BERWUJUD	38,270,423,350		TOTAL LABA / RUGI	4,351,136,887
	INPRES REBOISASI DAN PENGADAAN BIBIT			TOTAL CADANGAN	
13	Inpres Reboisasi dan Pengadaan bibit	47,296,289		TOTAL MODAL DAN CADANGAN	4,532,136,887
	TOTAL INPRES.REB. DAN PENGADAAN BIBIT	47,296,289			
	AKTIVA LAIN-LAIN				
14	Piutang jangka Panjang	1,646,289,353	32	Rekening antar kantor	5,678,924,601
15	Beban yang ditangguhkan	2,247,154,774	33	Rekening penutup	45,532,432,711
16	A.T yang dipergunakan oleh Pihak III	19,690,799			
	Ak.peny. A.T yang dipergunakan Pihak III	(17,236,870)			
17	Aktiva Tetap yang berwujud yang akan dihapus	2,075,513,442			
	Ak.peny. A.T yang akan dihapus	(2,075,513,442)			
	TOTAL AKTIVA LAIN-LAIN	3,930,371,796		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	65,810,242,914
	TOTAL AKTIVA	65,810,242,914			

Tabel V.4
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
LAPORAN LABA/RUGI
Per 31 Desember 1995

No	URAIAN	SALDO
1	PENDAPATAN	
a	Penjualan	110,336,971,812
b	Penyerahan hasil hutan	11,214,991,861
c	Jumlah Pendapatan (a + b)	121,551,963,673
2	HARGA POKOK PENDAPATAN	87,376,287,135
3	LABA/RUGI KOTOR (1 - 2)	34,175,676,538
4	BIAYA USAHA	
a	Biaya Pemasaran	2,414,657,943
b	Biaya Umum	28,135,649,146
c	Jumlah Biaya Usaha (a + b)	30,550,307,089
5	LABA/RUGI USAHA (3 - 4)	3,625,369,449
6	HASIL DAN BIAYA DILUAR USAHA POKOK	
a	hasil diluar usaha pokok	3,267,892,431
b	Biaya diluar usaha pokok	2,541,124,993
c	Jumlah hasil dan biaya diluar usaha pokok	726,767,438
7	LABA SEBELUM PAJAK	4,352,136,887
8	PAJAK PENGHASILAN BADAN	
9	LABA SETELAH PAJAK	4,352,136,887

Tabel 3
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
NERACA
 Per 31 Desember 1996

No	Nama rekening	Saldo	No	Nama Rekening	Saldo	
1	2	3	4	5	6	
	AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN DAN MODAL		
1	Kas dan Bank	7,354,951,732	18	Hutang Pajak	1,514,682,491	
2	Surat Berharga (Investasi Sementara)	2,000,000,000	19	Kewajiban lain kepada negara	641,795,682	
3	Piutang usaha	3,056,726,996	20	Hutang Usaha	3,182,666,743	
	Penyisihan Kerugian Piutang Usaha	(90,543,264)	21	Biaya yang masih harus dibayar	2,864,762,992	
4	Piutang Lain-lain	130,653,884	22	Premi produksi yang masih harus dibayar	1,456,877,321	
	Penyisihan Kerugian Piutang Lain-lain	(21,871,999)	23	Hutang jasa produksi	75,443,931	
5	Uang Muka Karyawan/Pelaksana Kerja/Pihak III	314,793,889	24	Uang muka penjualan hasil hutan	331,673,968	
6	Pendapatan yang masih akan diterima	10,525,665	25	Kewajiban lancar lainnya	88,972,431	
7	Persediaan hasil hutan	8,624,527,802		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR	10,156,875,559	
8	Persediaan Perlengkapan Kerja	645,321,523		HUTANG JANGKA PANJANG		
9	Biaya Dibayar Dimuka	413,631,418	26	Hutang jangka panjang luar negeri	2,551,794	
10	Pembayaran dimuka pembangunan / HKM	7,300,312,522	27	Hutang jangka panjang lainnya	25,421,873	
11	Uang Muka Pajak	847,961,153	28	Hutang dana sisa laba	1,343,191,401	
	TOTAL AKTIVA LANCAR	30,586,991,321	29	Hutang potongan karyawan	103,730,602	
	AKTIVA TETAP BERWUJUD			TOTAL HUTANG JANGKA PANJANG	1,474,995,670	
12	Aktiva tetap harga perolehan	83,230,727,593		LABA / RUGI		
	Akumulasi penyusutan aktiva tetap	(40,568,925,409)		31	Laba tahun berjalan	6,867,015,088
	TOTAL AKTIVA TETAP BERWUJUD	42,661,802,184		TOTAL LABA / RUGI	-6,867,015,088	
13	INPRES REBOISASI DAN PENGADAAN BIBIT			TOTAL CADANGAN		
	Inpres Reboisasi dan Pengadaan bibit	-		TOTAL MODAL DAN CADANGAN	6,867,015,088	
	TOTAL INPRES.REB. DAN PENGADAAN BIBIT	-				
	AKTIVA LAIN-LAIN					
14	Piutang jangka Panjang	1,534,362,880		32	Rekening antar kantor	1,038,652,498
15	Beban yang ditangguhkan	3,654,982,562		33	Rekening penutup	58,901,650,048
16	A.T yang dipergunakan oleh Pihak III	12,018,476				
	Ak.peny. A.T yang dipergunakan Pihak III	(10,968,560)				
17	Aktiva Tetap yang berwujud yang akan dihapus	2,015,837,392				
	Ak.peny. A.T yang akan dihapus	(2,015,837,392)				
	TOTAL AKTIVA LAIN-LAIN	5,190,395,358		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	78,439,188,863	
	TOTAL AKTIVA	78,439,188,863				

Tabel V.6
PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
LAPORAN LABA/RUGI
Per 31 Desember 1996

No	URAIAN	SALDO
1	PENDAPATAN	
a	Penjualan	141,867,899,722
b	Penyerahan hasil hutan	10,443,821,631
c	Jumlah Pendapatan (a + b)	152,311,721,353
2	HARGA POKOK PENDAPATAN	102,754,823,769
3	LABA/RUGI KOTOR (1 - 2)	49,556,897,584
4	BIAYA USAHA	
a	Biaya Pemasaran	3,367,243,848
b	Biaya Umum	40,828,431,678
c	Jumlah Biaya Usaha (a + b)	44,195,675,526
5	LABA/RUGI USAHA (3 - 4)	5,361,222,058
6	HASIL DAN BIAYA DILUAR USAHA POKOK	
a	hasil diluar usaha pokok	5,187,998,216
b	Biaya diluar usaha pokok	3,681,998,216
c	Jumlah hasil dan biaya diluar usaha pokok	1,505,793,030
7	LABA SEBELUM PAJAK	6,867,015,088
8	PAJAK PENGHASILAN BADAN	
9	LABA SETELAH PAJAK	6,867,015,088

B. Analisis Data

Untuk dapat menjawab masalah-masalah seperti yang diutarakan pada BAB I, maka berikut ini dilakukan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Dimana hasil analisis ini untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan yang dilihat dari aspek keuangannya saja.

Adapun hasil analisis ratio terhadap laporan keuangan perusahaan **Perum Perhutani Unit III Jawa Barat** dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 adalah sebagai berikut:

1. Analisis Ratio laporan keuangan menurut SK Menteri Keuangan No.198 / KMK.016 / 1998.

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos dalam Neraca dan Laporan Laba dan Rugi baik secara individu maupun kombinasi dari kedua laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer. 198 / KMK.016 / 1998 ini berguna untuk mengetahui atau menilai tingkat kesehatan perusahaan (BUMN), masing-masing indikator yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (*ROE*)
- b. Imbalan Investasi (*ROI*)
- c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)
- d. Rasio Lancar
- e. Perputaran Piutang (*Collection Periods*)

- f. Perputaran Persediaan
- g. Perputaran Total Asset
- h. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva

Secara khusus pembahasan metode penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Imbalan Kepada Pemegang Sahamnya / *ROE*

Rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Definisi:

- Laba setelah pajak adalah laba bersih dikurangi laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva non produktif, aktiva lain-lain, serta saham penyertaan langsung.
- Modal sendiri seluruh komponen modal sendiri pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan tidak termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva tetap dalam pelaksanaan adalah posisi akhir tahun buku aktiva tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel V.7
Perhitungan Tingkat Imbalan pada Pemegang Saham

Tahun	Modal Sendiri	Laba Setelah Pajak
1994	47.688.362.153	2.761.439.997
1995	55.563.594.199	4.352.136.887
1996	66.807.317.634	6.867.015.088

Maka besarnya ROE untuk :

$$\begin{aligned} \text{Th '94} &= \frac{2.761.439.997}{47.688.362.153} \times 100 \% \\ &= 5,79 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th '95} &= \frac{4.352.136.887}{55.563.594.199} \times 100 \% \\ &= 7,83 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th '96} &= \frac{6.867.015.088}{66.807.317.634} \times 100 \% \\ &= 10,28 \% \end{aligned}$$



Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat imbalan pada pemegang saham selama tiga tahun terakhir. Tingkat imbalan pada pemegang saham tahun 1994 sampai dengan 1996 mengalami kenaikan atau peningkatan.

b. Imbalan Investasi (ROI)

Rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi:

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva non produktif, aktiva lain-lain, dan saham penyertaan langsung.
- Penyusutan adalah depresiasi, amortisasi dan depleksi.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan (dalam penyelesaian dikurangi oleh aktiva tetap pihak ke tiga / tidak operasional)

Tabel V.8
Perhitungan Tingkat Imbalan Investasi

Tahun	EBIT	Penyusutan	Capital Employed
1994	2.133.149.429	30.564.231.687	57.232.393.261
1995	3.625.369.449	34.760.776.154	65.807.789.005
1996	5.361.222.058	40.568.925.409	78.438.138.957

Maka besarnya ROI untuk :

$$\begin{aligned} \text{Th 1994} &= \frac{2.133.149.429 + 30.564.231.687}{57.232.393.261} \times 100 \% \\ &= 57,13 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1995} &= \frac{3.625.369.449 + 34.760.776.154}{65.807.789.005} \times 100 \% \\ &= 58,33 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1996} &= \frac{5.361.222.058 + 40.568.925.409}{78.438.138.957} \times 100 \% \\ &= 58,56 \% \end{aligned}$$

Dari penilaian diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat imbalan investasi selama tiga tahun terakhir. Imbalan investasi tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 mengalami peningkatan.

c. Ratio Kas (*Cash Ratio*)

Rumus :

$$\text{Ratio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Srt Berharga Jk. Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, bank dan surat berharga jangka pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5.9
Perhitungan Tingkat Rasio Kas (Cash Ratio)

Tahun	KAS dan BANK	Surat Berharga Jangka Pendek	CURRENT LIABILITIES
1994	6.417.851.594	-	8.511.753.813
1995	7.146.529.321	500.000.000	9.120.582.637
1996	7.354.951.732	2.000.000.000	10.156.875.559

Maka besarnya Ratio Kas untuk :

$$\begin{aligned} \text{Th 1994} &= \frac{6.417.851.594}{8.511.753.813} \times 100\% \\ &= 75,40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1995} &= \frac{7.146.529.321 + 500.000.000}{9.120.582.637} \times 100\% \\ &= 83,84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1996} &= \frac{7.354.951.732 + 2.000.000.000}{10.156.875.559} \times 100\% \\ &= 92,10\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat rasio kas selama tiga tahun terakhir. Tingkat rasio kas tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 mengalami peningkatan.

Pada tahun 1994 besarnya tingkat rasio kas sebesar 75,40%. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan sebesar 75,40%. Atau setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,754.

Pada tahun 1995 besarnya tingkat rasio kas sebesar 83,84%. Dalam tahun ini terjadi peningkatan rasio kas sebesar 0,11% dari tahun 1994. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan sebesar 83,84%. Atau setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,834.

Pada tahun 1996 besarnya tingkat rasio kas sebesar 92,10%. Dalam tahun ini terjadi peningkatan sebesar 0,2% dari tahun 1995. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan sebesar 92,10%. Atau setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,921.

d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rumus :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi:

- Current Asset adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel V.10
Daftar Tingkat Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Tahun	Current Asset	Current Liabilities
1994	18.989.844.184	8.511.753.813
1995	23.562.151.479	9.120.582.637
1996	30.586.991.321	10.156.875.559

Maka besarnya Rasio Lancar untuk :

$$\begin{aligned} \text{Th 1994} &= \frac{18.989.844.184}{8.511.753.813} \times 100 \% \\ &= 223,10 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1995} &= \frac{23.562.151.479}{9.120.582.637} \times 100 \% \\ &= 258,34 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1996} &= \frac{30.586.991.321}{10.156.875.559} \times 100 \% \\ &= 301,15 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat rasio lancar atau tingkat likuiditasnya selama tiga tahun terakhir. Rasio lancar tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 mengalami peningkatan.

e. Perputaran Piutang (*Collection Periods*)

Rumus :

$$\text{Collection Periods} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi piutang usaha dikurangi dengan cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku.
- Total pendapatan usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku.

Tabel 5.11
Daftar Tingkat *Collection Periods*

Tahun	Total Piutang Usaha	Total Pendapatan Usaha
1994	3.486.638.742	80.102.115.196
1995	2.747.021.751	121.551.963.673
1996	2.966.183.732	152.311.721.353

Maka besarnya *Collection Periods* untuk :

$$\begin{aligned} \text{Th 1994} &= \frac{3.486.638.742}{80.102.115.196} \times 365 \text{ hari} \\ &= 15,887 \text{ atau } 16 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1995} &= \frac{2.747.021.751}{121.551.963.673} \times 365 \text{ hari} \\ &= 8,24 \text{ atau } 8 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1996} &= \frac{2.966.183.732}{152.311.721.353} \times 365 \text{ hari} \\ &= 7,10 \text{ atau } 7 \text{ hari} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat *Collection Periods* selama tiga tahun terakhir. *Collection periods* selama tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 mengalami peningkatan.

f. Perputaran Persediaan

Rumus :

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi:

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total pendapatan usaha adalah total pendapatan usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel V.12
Daftar Tingkat Perputaran Persediaan

Tahun	Total Persediaan	Total Pendapatan Usaha
1994	8.181.092.126	80.102.115.196
1995	10.397.995.002	121.551.963.673
1996	9.269.849.325	152.311.721.353

Maka besarnya Perputaran Persediaan untuk :

$$\begin{aligned} \text{Th 1994} &= \frac{8.181.092.126}{80.102.115.196} \times 365 \text{ hari} \\ &= 37,27 \text{ atau } 40 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1995} &= \frac{10.397.995.002}{121.551.963.673} \times 365 \text{ hari} \\ &= 31,225 \text{ atau } 32 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1996} &= \frac{9.269.849.325}{152.311.721.353} \times 365 \text{ hari} \\ &= 22,214 \text{ atau } 23 \text{ hari} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat perputaran persediaan selama tiga tahun terakhir. Perputaran persediaan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 mengalami peningkatan.

g. Perputaran Total Asset (*Total Asset Turnover*),

Rumus :

$$\text{Perputaran Total Asset} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah total pendapatan usaha dan non usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap.
- *Capital Employed* adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Tabel 5.13
Daftar Perputaran total Asset (*Total Asset Turnover*)

Tahun	Total Pendapatan	<i>Capital Employed</i>
1994	82.673.988.487	57.232.393.261
1995	124.819.856.104	65.807.789.005
1996	157.499.512.599	78.438.138.957

Maka besarnya Perputaran Total Asset untuk :

$$\text{Th 1994} = \frac{82.673.988.487}{57.232.393.261} \times 100 \%$$

$$= 1,44453 \text{ kali atau } 144,453 \%$$

$$\text{Th 1995} = \frac{124.819.856.104}{65.807.789.005} \times 100 \%$$

$$= 1,89673 \text{ kali atau } 189,673 \%$$

$$\text{Th 1996} = \frac{157.499.512.599}{78.438.138.957} \times 100 \%$$

$$= 2,00795 \text{ kali atau } 200,795 \%$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan selama tiga tahun terakhir. Tingkat perputaran total asset tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 mengalami peningkatan.

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Rumus :

$$\text{Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun, buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah total asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan

Tabel V.13
Daftar Tingkat Rasio Modal sendiri terhadap Total Asset

Tahun	Total Modal Sendiri	Total Asset
1994	47.688.362.153	57.233.907.482
1995	55.563.594.199	65.810.242.914
1996	66.807.317.634	78.439.188.863

Maka besarnya Total Modal Sendiri terhadap Total Asset untuk :

$$\begin{aligned} \text{Th '94} &= \frac{47.688.362.153}{57.233.907.482} \times 100 \% \\ &= 83,32 \% \end{aligned}$$

$$\text{Th '95} = \frac{55.563.594.199}{65.810.242.914} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned}
 &= 84,43 \% \\
 \text{Th '96} &= \frac{66.807.317.634}{78.439.188.863} \times 100 \% \\
 &= 85,17 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan rasio total modal sendiri terhadap total asset selama tiga tahun terakhir. Rasio total modal sendiri terhadap total asset tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 mengalami kenaikan atau peningkatan.

2. Penilaian kinerja berdasarkan SK Menteri Keuangan yang diukur melalui tingkat kesehatan keuangan (financial) perusahaan.

Dalam penilaian kinerja perusahaan ini, yang menjadi acuan adalah tingkat kesehatan perusahaan. Setelah menentukan besarnya nilai atau bobot dari masing-masing indikator, barulah dapat disesuaikan dengan bobot yang menjadi standar acuan yang ada dalam ketetapan Surat Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dalam hal ini mengacu pada SK Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998. Dimana dalam Surat Ketetapan tersebut standar maksimal untuk masing-masing bobot dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- Imbalan kepada pemegang saham (ROE), mempunyai bobot maksimal sebesar 20.
- Imbalan Investasi (ROI), mempunyai bobot maksimal sebesar 15.

- Rasio Kas (Cash Ratio), mempunyai bobot maksimal sebesar 5.
- Rasio Lancar (Current Ratio), mempunyai bobot maksimal sebesar 5.
- Collection Period, mempunyai bobot maksimal sebesar 5.
- Perputaran Persediaan, mempunyai bobot maksimal sebesar 5.
- Perputaran Total Asset (TATO), mempunyai bobot maksimal sebesar 5.
- Ratio Total Modal sendiri terhadap Total Asset, mempunyai bobot maksimal sebesar 10.

Maka berdasarkan hasil perhitungan yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut;

a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)

- Untuk tahun 1994 diperoleh hasil sebesar 5,79 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 8,5.
- Untuk tahun 1995 diperoleh hasil sebesar 7,83 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 10.
- Untuk tahun 1996 diperoleh hasil sebesar 10,28 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 14.

b. Imbalan Investasi (ROI)

- Untuk tahun 1994 diperoleh hasil sebesar 57,13 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 15.
- Untuk tahun 1995 diperoleh hasil sebesar 58,33 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 15.

- Untuk tahun 1996 diperoleh hasil sebesar 58,56 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 15.

c. Rasio Kas / *Cash Ratio*

- Untuk tahun 1994 diperoleh hasil sebesar 5,79 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 8,5.
- Untuk tahun 1995 diperoleh hasil sebesar 5,79 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 8,5.
- Untuk tahun 1996 diperoleh hasil sebesar 5,79 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 8,5.

d. Rasio Lancar / *Current Ratio*

- Untuk tahun 1994 diperoleh hasil sebesar 233,10 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.
- Untuk tahun 1994 diperoleh hasil sebesar 258,34 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.
- Untuk tahun 1994 diperoleh hasil sebesar 301,15 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.

e. *Collection Periods*

- Untuk tahun 1994 diperoleh hasil sebesar 15,887 , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.
- Untuk tahun 1995 diperoleh hasil sebesar 8,249 , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.

- Untuk tahun 1996 diperoleh hasil sebesar 7,108 , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.

f. Perputaran Persediaan

- Untuk tahun 1994 diperoleh hasil sebesar 37,279 , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.
- Untuk tahun 1995 diperoleh hasil sebesar 31,225 , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.
- Untuk tahun 1996 diperoleh hasil sebesar 22,214 , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.

g. Perputaran Total Asset / Total Asset Turn Over (TATO)

- Untuk tahun 1994 diperoleh hasil sebesar 144,453 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.
- Untuk tahun 1995 diperoleh hasil sebesar 189,673 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.
- Untuk tahun 1996 diperoleh hasil sebesar 200,795 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 5.

h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset

- Untuk tahun 1994 diperoleh hasil sebesar 83,32 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 7.
- Untuk tahun 1995 diperoleh hasil sebesar 84,43 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 7.

- Untuk tahun 1996 diperoleh hasil sebesar 85,17 % , berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 7.

Secara rinci kinerja dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Indikator	Th 1994	Th 1995	Th 1996
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	8,5	10	14
2. Imbalan Investasi (ROI)	15	15	15
3. Rasio Kas	5	5	5
4. Rasio Lancar	5	5	5
5. Collection Periods	5	5	5
6. Perputaran Persediaan	5	5	5
7. Perputaran Total asset	5	5	5
8. Rasio Modal Sendiri terhadap Total aktiva	7	7	7
Total	55,5	57	61

C. Pembahasan

Untuk menjawab masalah-masalah seperti yang diutarakan pada BAB I, maka berikut ini merupakan pembahasan yang diperoleh dari hasil analisis data.

1. Analisis rasio laporan keuangan menurut SK Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1988
 - a. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat imbalan pada pemegang saham selama tiga tahun terakhir. Tingkat

imbalan pada pemegang saham tahun 1994 sampai dengan 1996 mengalami kenaikan atau peningkatan.

Pada tahun 1994 diketahui besarnya tingkat imbalan pada pemegang saham sebesar 5,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa adalah sebesar 5,79%. Ini berarti juga bahwa setiap rupiah modal sendiri menghasilkan keuntungan netto Rp 0,0579 yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan saham biasa.

Pada tahun 1995 besarnya tingkat imbalan pada pemegang saham sebesar 7,83%. Dalam tahun ini mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 0,035%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa adalah sebesar 7,83%. Ini berarti juga bahwa setiap rupiah modal sendiri menghasilkan keuntungan netto Rp 0,0783 yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan saham biasa.

Sedangkan pada tahun 1996 besarnya tingkat imbalan pada pemegang saham meningkat sebesar 10,28% atau kenaikan ini sebesar 0,31%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa adalah sebesar 10,28%. Ini berarti juga bahwa setiap rupiah modal sendiri menghasilkan keuntungan netto Rp 0,1028 yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan saham biasa.

b. Imbalan Investasi (ROE)

Pada tahun 1994 tingkat imbalan investasi (*ROI*) sebesar 57,13%. Hal ini berarti bahwa kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan adalah sebesar 57,13%.

Pada tahun 1995 tingkat imbalan investasi meningkat menjadi sebesar 58,33% atau mengalami kenaikan sebesar 0,02%. Kenaikan ini besar dipengaruhi oleh kenaikan EBIT, penyusutan serta *capital employed* yang relatif meningkat.

Sedangkan pada tahun 1996 tingkat imbalan investasi meningkat menjadi 58,56% atau mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Kenaikan ini sama-sama dipengaruhi oleh kenaikan EBIT, penyusutan serta *capital employed* yang relatif meningkat.

c. Rasio Kas

Pada tahun 1994 besarnya tingkat rasio kas sebesar 75,40%. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan sebesar 75,40%. Atau setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,754.

Pada tahun 1995 besarnya tingkat rasio kas sebesar 83,84%. Dalam tahun ini terjadi peningkatan rasio kas sebesar 0,11% dari tahun 1994. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan sebesar

83,84%. Atau setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,834.

Pada tahun 1996 besarnya tingkat rasio kas sebesar 92,10%. Dalam tahun ini terjadi peningkatan sebesar 0,2% dari tahun 1995. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang dapat segera diuangkan sebesar 75,40%. Atau setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,754.

d. Rasio lancar

Pada tahun 1994 besarnya rasio lancar sebesar 223,10%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hutang lancar perusahaan sebesar Rp 1.00 dijamin dengan aktiva lancar perusahaan sebesar Rp 2,231. Dengan demikian perusahaan mengalami likuid, karena perusahaan mampu melunasi semua hutang lancarnya dengan aktiva yang ada.

Pada tahun 1995 tingkat Current Ratio sebesar 258,34 %. Dalam tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,16% dari tahun 1995. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hutang lancar perusahaan sebesar Rp 1.00 dijamin dengan aktiva lancar perusahaan sebesar Rp 2,5834. Dengan demikian perusahaan mengalami likuid, karena perusahaan mampu melunasi semua hutang lancarnya dengan aktiva yang ada.

Pada tahun 1996 tingkat Current Ratio sebesar 301,15 %. Dalam tahun ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,17%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap

hutang lancar perusahaan sebesar Rp 1.00 dijamin dengan aktiva lancar perusahaan sebesar Rp 3,0115. Dengan demikian perusahaan mengalami likuid, karena perusahaan mampu melunasi semua hutang lancarnya dengan aktiva yang ada.

e. Perputaran Piutang (*Collection Periods*)

Pada tahun 1994 *collection periods* sebesar 16 hari. Hal ini berarti periode yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang setiap 16 hari sekali.

Pada tahun 1995 *collection periods* sebesar 8 hari. Dalam tahun ini mengalami kenaikan sebesar 100% dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti periode yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang setiap 9 hari sekali. Dalam tahun ini nampak suatu peningkatan yang tajam dalam mengumpulkan kembali piutang-piutang perusahaan.

Pada tahun 1996 *collection periods* sebesar 7 hari. Dalam tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Hal ini berarti periode yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang setiap 8 hari sekali.

f. Perputaran Persediaan

Pada tahun 1994 perputaran persediaan sebesar 40 hari. Hal ini berarti bahwa pada tahun 1994 waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengolah persediaan hingga produk laku untuk dijual atau diakui menjadi suatu pendapatan adalah sebesar 40 hari.

Pada tahun 1995 perputaran persediaan sebesar 32 hari. Dalam tahun ini mengalami kenaikan 0,25% dari tahun 1994. Hal ini berarti periode yang dibutuhkan perusahaan untuk mengolah persediaan menjadi pendapatan usaha meningkat sebesar 32 hari.

Pada tahun 1996 perputaran persediaan sebesar 23 hari. Dalam tahun ini mengalami kenaikan 0,39% dari tahun 1994. Hal ini berarti periode yang dibutuhkan perusahaan untuk mengolah persediaan meningkat menjadi pendapatan usaha meningkat sebesar 23 hari.

g. Perputaran Total Asset

Pada tahun 1994 perputaran total asset sebesar 1,44453 kali atau 144,453%. Hal ini berarti kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam tahun 1994 atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan *revenue* adalah 1,44453 kali atau 144,453%. Dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam tahun 1994 berputar 1,44453 kali atau setiap rupiah akktiva selama setahun dapat menghasilkan *revenue* sebesar Rp 1,44.

Untuk tahun 1995 besarnya tingkat perputaran total asset sebesar 1,89673 kali atau 189,673%. Dalam tahun ini mengalami kenaikan tingkat perputaran total asset sebesar 0,4522 atau 0,31%. Hal ini berarti kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam tahun 1995 atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan *revenue* adalah 1,89673 kali atau 189,673%. Dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva

rata-rata dalam tahun 1995 berputar 1,89673 kali atau setiap rupiah akktiva selama setahun dapat menghasilkan *revenue* sebesar Rp 1,897.

Sedangkan untuk tahun 1996 besarnya tingkat perputaran total asset sebesar 2,00795 kali atau 200,795%. Dalam tahun ini terjadi peningkatan sebesar 0,111 kali atau 0,06 %. Hal ini berarti kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam tahun 1996 atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan *revenue* adalah 2,00795 kali atau 200,785%. Dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam tahun 1996 berputar 2,00795 kali atau setiap rupiah akktiva selama setahun dapat menghasilkan *revenue* sebesar Rp 2,01.

h. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Pada tahun 1994 besarnya rasio total modal sendiri terhadap total asset sebesar 83,32%. Ini berarti dari total asset yang ada di perusahaan, 83,32 %-nya merupakan modal sendiri.

Pada tahun 1995 besarnya rasio total modal sendiri terhadap total asset sebesar 84,43%. Dalam tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Kenaikan ini diakibatkan dengan bertambahnya total aset yang diikuti oleh kenaikan jumlah modal sendiri. Hal ini berarti dari total asset yang ada dalam perusahaan 84,43%-nya merupakan modal sendiri.

Pada tahun 1996 besarnya rasio total modal sendiri terhadap total asset sebesar 85,17%. Dalam tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,008%. Kenaikan ini diakibatkan dengan bertambahnya total aset yang diikuti oleh

kenaikan jumlah modal sendiri. Hal ini berarti dari total asset yang ada dalam perusahaan 85,17%-nya merupakan modal sendiri.

2. Penilaian kinerja berdasarkan SK Menteri Keuangan yang diukur melalui tingkat kesehatan keuangan perusahaan.
 - a. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)

Diketahui bahwa besarnya skor berdasarkan SK menteri Keuangan untuk tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 berturut-turut adalah sebagai berikut: 8,5 , 10 , dan 14. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan.

Pada tahun 1994 besarnya skor adalah 8,5. Sedangkan besarnya skor maksimal adalah 20. Berarti dalam tahun ini kemampuan atas ROE adalah kurang baik atau kurang efektif. Hal ini disebabkan karena kecilnya laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan yang tidak sebanding dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pada tahun 1995 besarnya skor ROE mengalami peningkatan menjadi 10. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahun ini kemampuan atas ROE mengalami kenaikan yang positif. Hal ini disebabkan karena dalam tahun 1995 laba setelah pajak mengalami kenaikan yang cukup berarti.

Sedangkan pada tahun 1996 besarnya skor ROE semakin baik jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini bobot yang diperoleh adalah sebesar 14. Disini dapat dikatakan bahwa ROE untuk tahun ini sudah cukup baik, karena lambat laun telah terjadi peningkatan atas laba yang

diperoleh oleh perusahaan yang otomatis mempengaruhi kenaikan nilai atau bobot dari rasio ini.

b. Imbalan Investasi (ROI)

Diketahui bahwa besarnya skor berdasarkan SK Menteri Keuangan mencapai nilai maksimal, yakni 15. Ini berarti bahwa untuk imbalan investasi perusahaan dapat dikatakan sangat baik. Selama tiga tahun terakhir perkembangan akan rasio ini mengalami keadaan yang stabil atau perkembangannya sangat baik.

c. Rasio Kas

Dalam tahun 1994 sampai dengan tahun 1994 perkembangan rasio kas di perusahaan ini juga mengalami perkembangan yang sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan yang mengacu pada SK Menteri Keuangan skor yang diperoleh mencapai nilai maksimal atau sangat ideal. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas dapat dicapai atau dapat dipenuhi oleh perusahaan.

d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Perkembangan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 dapat dikatakan sangat baik. Disini dapat dilihat besarnya nilai atau skor yang diukur berdasarkan SK Menteri Keuangan tersebut adalah konstan yakni sebesar 5. Atau dengan kata lain untuk rasio ini perusahaan memperoleh nilai maksimal. Ini berarti bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya yang harus dipenuhi dengan aktiva lancar dapat dipenuhi atau dicapai oleh perusahaan.

e. *Collection Periods*

Perkembangan *collection periods* dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 dapat dikatakan sangat baik. Disini dapat dilihat besarnya nilai atau skor yang diukur berdasarkan SK Menteri Keuangan tersebut adalah konstan yakni sebesar 5. Atau dengan kata lain untuk rasio ini perusahaan memperoleh nilai maksimal. Hal ini berarti bahwa periode yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kembali piutang-piutang perusahaan dapat dilakukan dengan baik, dengan kata lain pengumpulan piutang tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

f. Perputaran Persediaan

Perkembangan perputaran persediaan perusahaan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 dapat dikatakan sangat baik. Disini dapat dilihat besarnya nilai atau skor yang diukur berdasarkan SK Menteri Keuangan tersebut adalah konstan yakni sebesar 5. Atau dengan kata lain untuk rasio ini perusahaan memperoleh nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran persediaan didalam perusahaan dapat dikatakan sudah efektif.

g. Perputaran Total Asset (*Total Asset Turnover*)

Perkembangan perputaran total asset dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 dapat dikatakan baik. Disini dapat dilihat besarnya nilai atau skor yang diukur berdasarkan SK Menteri Keuangan tersebut adalah konstan yakni sebesar 7. Sedangkan standar bobot nilai atau skor adalah sebesar 10. Tapi dapatlah dikatakan bahwa perputaran total asset sudah cukup baik. Hal ini



berarti bahwa dana yang tertanam atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan *revenue* sudah cukup baik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis terhadap laporan keuangan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, maka dapat ditarik kesimpulan.

A. Kesimpulan

1. Analisis rasio keuangan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir ditinjau dari tingkat:

- a. Imbalan Kepada Pemegang Saham (*ROE*)

Tingkat Imbalan Kepada Pemegang Saham selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini diikuti oleh kenaikan laba setelah pajak dan besarnya modal sendiri. Pada tahun 1996 nampak bahwa terjadi kenaikan yang cukup berarti dari tahun-tahun sebelumnya.

- b. Imbalan Investasi (*ROI*)

Tingkat Imbalan Investasi dilihat dari perkembangannya selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan ini dianggap sebagai suatu yang positif karena sesuai dengan maksudnya, ROI digunakan untuk menghitung berapa besar kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan.

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Tingkat Rasio Kas dalam tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan atau kenaikan. Pada tahun 1994 yang mempunyai tingkat rasio sebesar 75,4 % mengalami kenaikan hingga tahun 1996 sebesar 92,10 %. Ini berarti bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dapat dipenuhi.

d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Tingkat Rasio lancar dari tahun 1994 hingga tahun 1996 mengalami kenaikan. Hal ini terlihat besarnya rasio lancar untuk tahun 1994 sebesar 223,10 % mengalami peningkatan atau kenaikan hingga pada tahun 1996 yang mana besarnya rasio lancar 301,15 %. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus dipenuhi dengan aktiva lancar dapat dipenuhi.

e. Perputaran Piutang (*Collection Periods*)

Tingkat Perputaran Piutang dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, hal ini terbukti dengan semakin baiknya tingkat perputaran piutang dari tahun 1994 yang besarnya 15,887 atau 16 hari hingga tahun 1996 yang besarnya 7,108 atau 7 hari. Ini terlihat semakin kecilnya tingkat pengembalian piutang dalam tiap periode akuntansi.

f. Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*)

Tingkat Perputaran Persediaan dalam tiga tahun mengalami kenaikan atau perbaikan, hal ini terbukti dengan semakin baiknya tingkat perputaran

persediaan dari tahun 1994 yang sebesar 37,279 atau 37 hari hingga tahun 1996 yang besarnya 22,214 atau 22 hari. Ini berarti bahwa perputaran persediaan dalam tiap periode semakin baik.

g. Perputaran Total Asset (Total Asset Turnover)

Tingkat Perputaran Total asset dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari tahun 1994 yang besarnya 144,453 % meningkat menjadi 200,795% pada tahun 1996. Ini juga berarti bahwa kemampuan dana yang tertanam dalam aktiva perusahaan berputar dalam tiap periodenya.

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Tingkat rasio modal sendiri terhadap total asset mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Ini terlihat pada tahun 1994 yang besarnya 83,32% meningkat pada tahun 1996 menjadi 85,17%. Kenaikan ini disebabkan karena semakin meningkatnya modal sendiri yang diikuti oleh berkembangnya total asset perusahaan

2. Tingkat Kinerja Keuangan Perum Perhutani Unit III Jawa barat selama 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor.198/KMK0.16/1998

Hasil perhitungan tingkat keuangan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996, menunjukkan bahwa kondisi kinerja keuangan dalam kondisi cukup baik. Dalam hal ini terjadi fluktuasi

kenaikan kinerja dengan total bobot nilai tahun 1994 sebesar 55,5 dan tahun 1995 sebesar 57 dan terakhir pada tahun 1996 menjadi 61.

Sebenarnya secara keseluruhan nilai yang dicapai perusahaan berdasarkan aspek financialnya semakin mendekati nilai sempurna atau hampir mendekati bobot nilai maksimal seperti yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998 sebesar 70. Jika dilihat perkembangannya dari tahun 1994 yang mana nilai bobot kinerja masih jauh dari maksimal, hal ini disebabkan oleh dua faktor rasio yang dalam hal ini masih kurang efisien, yakni dari tingkat imbalan kepada pemegang saham (ROE) dan tingkat total modal sendiri terhadap total asset. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau efisien.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Data yang diolah adalah data yang diperoleh dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan penulis meyakini bahwa data tersebut mencerminkan keadaan perusahaan sebenarnya dan kurang dapat melacak kebenarannya data tersebut.
2. Penulis hanya dapat menilai kinerja perusahaan selama tiga periode akuntansi dan terbatas pada aspek keuangannya saja.

C. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan beberapa kesimpulan yang telah diambil, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dengan meningkatnya perkembangan tingkat rasio keuangan dari tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 yang mengarah pada laju perkembangan yang positif, maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kondisi keuangan perusahaan tetap dan akan semakin baik.
2. Tingkat kesehatan keuangan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat selama tiga periode mengalami perkembangan yang cukup baik dan berada dalam kondisi sehat. Keadaan kesehatan keuangan ~~yang baik ini~~ yang baik ini hendaknya terus dipertahankan agar perusahaan dapat terus berkembang dan dapat terus bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Syafaruddin, (1974), *Alat-Alat Analisis Dalam Perbelanjaan*, Yogyakarta; Andi Offset.
- Anoraga Pandji, (1995), *BUMN Swasta dan Koperasi*, Jakarta; PT Dunia Pustaka Jaya.
- Cooper, Donal R, (1996), *Metodelogi Penelitian Bisnis*, 5 Th ed., Cetakan Pertama, Jakarta; Erlangga.
- D. Prastowo Dwi, (1995), *Analisis Laporan keuangan*, Yogyakarta; UPP AMPYKPN.
- IAI, (1995), *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta; Salemba Empat.
- Kieso & Weygant, terj. (1995), *Akuntansi Intermediate*, Jakarta; Bina Rupa Aksara.
- Munawir, S, (1983), *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kedua, Yogyakarta; Liberti.
- Raharjo, Budi, (1994), *Memahami Laporan Keuangan*, Yogyakarta; Andi Offset.
- Riyanto, Bambang, (1993), *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, Yogyakarta; FE UGM.
- Syamsuddin, Lukman, (1985), *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Yogyakarta; Hanindita.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.826/KMK.013/1992, tanggal 24 Juli 1992.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.198/KMK.016/1998, tanggal 24 Maret 1998.
- Sarwoko dan Halim Abdul, (1989), *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta; FE UGM.
- Suryawijaya, M, Asri, *Dasar - Dasar Pembelian Perusahaan*, Yogyakarta, FE UGM dan LMP2M AMP YKPN.
- Weston. Fred. J dan Copeland E.Thomas, terj. (1995), *Managèrial Finance*, jakarta; Bina Rupa Aksara.

LAMPIRAN



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198 /KMK.016/1998

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka, perlu diandasi dengan sarana sistem penilaian kesehatan BUMN yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali sistem penilaian kinerja BUMN yang dapat mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan dengan memperhatikan kaedah penilaian kesehatan perusahaan yang berlaku umum ;
- c. bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732) ;

Kp. : BU/SJ.841/3.

6. Keputusan ... / 2



MENTERI KEUANGAN

6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51 % sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- (1) Penilaian tingkat kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Perseroan Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri.
- (2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada Lampiran I.
- (3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN.

Pasal 3

- (1) Tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi



MENTERI KEUANGAN

- 3 -

- a. SEHAT, yang terdiri dari:
 - AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$
 - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari:
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$
 - B apabila $30 < TS \leq 40$
 - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari:
 - CCC apabila $20 < TS \leq 30$
 - CC apabila $10 < TS \leq 20$
 - C apabila $TS \leq 10$
- (2) Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian:
- a. Aspek Keuangan. ✓
 - b. Aspek Operasional. ✓
 - c. Aspek Administrasi. ✓
- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian tingkat kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum.

BAB III

BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.

(2) Perubahan / 4

MENTERI KEUANGAN

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON-INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- a. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
 - d. Bendungan dan irigasi.

- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.

- (3) BUMN NON-INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi BUMN yang bergerak dibidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

BAB IV
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan



MENTERI KEUANGAN

- 5 -

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

BAU V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian tingkat kesehatan BUMN tahun buku 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1998

Menteri Keuangan

Fuad Bawazier

SALINAN Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum.



Drs. Djoko Widodo
NIP 060015174



Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor : 198/KMK.016/1990
Tanggal : 24 Maret 1990

MENTERI KEUANGAN

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR

NO	BUMN INFRASTRUKTUR	NO	BUMN NON INFRASTRUKTUR
1	ANGKASA PURA I, PT.	1	ADHI KARYA, PT.
2	ANGKASA PURA II, PT.	2	AMARTA KARYA, PT.
3	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN, PT.	3	BALAI PUSTAKA, PT.
4	DANRI, PERUM.	4	BARATA INDONESIA, PT.
5	JASA MARGA, PT.	5	BATAN TEKNOLOGI, PT.
6	JASA TIRTA, PERUM.	6	BHANDA GHARA REKSA, PT.
7	KERETA API, PERUM.	7	BINA KARYA, PT.
8	OTORITA JATILUHUR, PERUM.	8	BIO FARMA, PT.
9	P P O, PERUM.	9	BIRO KLASIFIKASI INDONESIA, PT.
10	PELABUHAN INDONESIA I, PT.	10	BOGA DISMA INDRA, PT.
11	PELABUHAN INDONESIA II, PT.	11	BRANTAS ABIPRAYA, PT.
12	PELABUHAN INDONESIA III, PT.	12	CAMBRICS PRIMISSIMA, PT.
13	PELABUHAN INDONESIA IV, PT.	13	CIPTA NIAGA, PT.
14	PERUMNAS, PERUM.	14	DAHANA, PT.
15	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA, PT.	15	DIARMA NIAGA, PT.
16	PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, PERUM.	16	DJAKARTA LLOYD, PT.
		17	DOK DAN PERKAPALAN KOJA BAHARI, PT.
		18	DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA, PT.
		19	GARAM, PT.
		20	GARUDA INDONESIA, PT.
		21	HOTEL INDONESIA INTERNATIONAL, PT.
		22	HUTAMA KARYA, PT.
		23	INDAH KARYA, PT.
		24	INDOFARMA, PT.
		25	INDRA KARYA, PT.
		26	INDUSTRI GELAS, PT.
		27	INDUSTRI KAPAL INDONESIA, PT.
		28	INDUSTRI KERETA API, PT.
		29	INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA, PT.
		30	INDUSTRI SANDANG I, PT.
		31	INDUSTRI SANDANG II, PT.
		32	INDUSTRI SODA INDONESIA, PT.
		33	INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT.
		34	INHUTANI I, PT.
		35	INHUTANI II, PT.
		36	INHUTANI III, PT.
		37	INHUTANI IV, PT.
		38	INHUTANI V, PT.
		39	ISTAKA KARYA, PT.
		40	JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG, PT.
		41	KAWASAN BERIKAT NUSANTARA, PT.
		42	KAWASAN INDUSTRI CILACAP, PT.
		43	KAWASAN INDUSTRI MAKASAR, PT.
		44	KAWASAN INDUSTRI MEDAN, PT.
		45	KERTAS KRAFT ACEH, PT.
		46	KERTAS LECES, PT.
		47	KERTAS PADALARANG, PT.
		48	KIMIA FARMA, PT.
		49	KLIRING DAN JAMINAN BURSA KOMODITI, PT.
		50	KONEBA, PT.
		51	KRAKATAU STEEL, PT.
		52	LEN INDUSTRI, PT.
		53	MEGA ELTRA, PT.



MENTERI KEUANGAN

TABEL KELOMPOK B U M N
INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR

NO	BUMN INFRASTRUKTUR	NO	BUMN NON INFRASTRUKTUR
		54	MERPATI NUSANTARA AIRWAYS, PT.
		55	NATOUR, PT.
		56	MINDYA KARYA, PT.
		57	PAL INDONESIA, PT.
		58	PRASADA PAMUNAH LIMBAH, PT.
		59	PDI PULAU BATAM, PT.
		60	PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, PT.
		61	PELNI, PT.
		62	PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PT.
		63	PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI, PT.
		64	PENGERUKAN INDONESIA, PT.
		65	PERCETAKAN NEGARA RI, PERUM.
		66	PERIKANAN NUSANTARA, PT.
		67	PERKEBUNAN NUSANTARA I, PT.
		68	PERKEBUNAN NUSANTARA II, PT.
		69	PERKEBUNAN NUSANTARA III, PT.
		70	PERKEBUNAN NUSANTARA IV, PT.
		71	PERKEBUNAN NUSANTARA IX, PT.
		72	PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT.
		73	PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT.
		74	PERKEBUNAN NUSANTARA VII, PT.
		75	PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, PT.
		76	PERKEBUNAN NUSANTARA X, PT.
		77	PERKEBUNAN NUSANTARA XI, PT.
		78	PERKEBUNAN NUSANTARA XII, PT.
		79	PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, PT.
		80	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, PT.
		81	PERURI, PERUM.
		82	PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT.
		83	PERHUTANI, PERUM.
		84	PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA, PT.
		85	PERTANI, PT.
		86	PINDAD, PT.
		87	POS INDONESIA, PT.
		88	PRAONYA FARAMITA, PT.
		89	PRODUKSI FILM NEGARA, PERUM.
		90	PUPUK SRIWIDJAJA, PT.
		91	RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA, PT.
		92	SANG HYANG SERI, PT.
		93	SARANA KARYA, PT.
		94	SARINAH, PT.
		95	SEMEN BATURAJA, PT.
		96	SEMEN KUPANG, PT.
		97	SUCOFINDO, PT.
		98	SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT, PT.
		99	SURVEY UDARA, PT.
		100	SURVEYOR INDONESIA, PT.
		101	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM, PT.
		102	TWC BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO, PT.
		103	VIRAMA KARYA, PT.
		104	WASKITA KARYA, PT.
		105	WIJAYA KARYA, PT.
		106	YODYA KARYA, PT.
		107	VARUNA-TIRTA PRAKARSYA, PT.



MENTERI KEUANGAN

TATA CARA PENJILAIAN TINGKAT KESEHATAN
 BUMN NON JASA KEUANGAN

ASPEK KEUANGAN

1. Total Bobot
 - BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 50
 - BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non Infra) 70

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.

Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kpd pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Collection periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri thd total Aktiva	6	0
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian

a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi :

- Laba Setelah Pajak adalah Laba Setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - Aktiva Tetap
 - Aktiva Non Produktif
 - Aktiva Lain-lain
 - Saham Penyertaan Langsung

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal Sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal Sendiri tersebut diatas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.



MENTERI KEUANGAN

Tabel 2 : Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROE	18	20
15 < ROE <= 15	13,5	18
13 < ROE <= 13	12	16
11 < ROE <= 11	10,5	14
9 < ROE <= 9	9	12
7,5 < ROE <= 7,5	7,5	10
6,5 < ROE <= 6,5	6	8,5
5,3 < ROE <= 5,3	5	7
4 < ROE <= 4	4	5,5
3 < ROE <= 3	3	4
2,5 < ROE <= 2,5	3	4
1 < ROE <= 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT 'A' (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10%, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - Aktiva Tetap
 - Aktiva Lain-lain
 - Aktiva Non Produktif
 - saham penyertaan langsung.
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Depleksi.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 3 : Daftar skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI <= 18	9	13,5
13 < ROI <= 15	8	12
12 < ROI <= 13	7	10,5
10,5 < ROI <= 12	8	9
9 < ROI <= 10,5	5	7,5
7 < ROI <= 9	4	8
5 < ROI <= 7	3,5	5
3 < ROI <= 5	3	4
1 < ROI <= 3	2,5	3
0 < ROI <= 1	2	2
ROI < 0	0	1



MENTERI KEUANGAN

Contoh perhitungan :
 PT 'A' (BUMN Infra) memiliki ROI 3% maka sesuai label 3 skor untuk Indikator ROI adalah 3.

c. Rasio Kas / Cash Ratio

Rumus

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Sd. Berharga Jgk. Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi

- Kas, Bank dan Surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x >= 35	3	5
25 <= x < 35	2,5	4
15 <= x < 25	2	3
10 <= x < 15	1,5	2
5 <= x < 10	1	1
0 <= x < 5	0	0

Contoh perhitungan

PT 'A' (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk Indikator cash ratio adalah 2,5.

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0



MENTERI KEUANGAN

Contoh perhitungan
 PT 'A' (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115%, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4.

c. Collection Periods (CP)

Rumus

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,8	2,4
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,8
300 < x	0 < x <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT 'A' (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
 - Perbaikan Collection Periods (7 hari) : 1,8
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT 'B' (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1998 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1999 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 1,2
 - Perbaikan Collection Periods (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralalan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

MENJERI KEUANGAN

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	35 < x <= 45	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,8	2,4
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,8
300 < x	0 < x <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 diatas.

Contoh Perhitungan

Contoh 1 :

PT 'A' (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
 - Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu 3

Contoh 2 :

PT 'B' (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
 - Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu 3,5

g. Perputaran Total Aset / Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus : $TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$

Definisi

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	4,5
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	4
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	3,5
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3
40 < x <= 60	x <= 0	1,5	2,5
20 < x <= 40	x <= 0	1	2
x <= 20	x <= 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.



MENTERI KEUANGAN

Contoh perhitungan

Contoh 1 :

PT 'A' (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70% dan pada tahun 1998 sebesar 50% hari.

Sesuai label 8 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2 :

PT 'B' (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset 100% dan pada tahun 1998 sebesar 80%.

Sesuai label 8 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

b. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS lhd TA)

Rumus

$$TMS \text{ lhd TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku di luar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS lhd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan

PT 'B' (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35%, maka sesuai label 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.

II. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

- BUMN INFRASTRUKTUR : 35
- BUMN NON INFRASTRUKTUR : 15



MENTERI KEUANGAN

2. Indikator yang dinilai

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "Contoh Indikator Aspek Operasional".

3. Jumlah Indikator

Jumlah Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkat/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

4. Sifat penilaian dan kategori penilaian.

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot Indikator yang bersangkutan
- Baik (B) : skor = 80% x Bobot Indikator yang bersangkutan
- Cukup (C) : skor = 50% x Bobot Indikator yang bersangkutan
- Kurang (K) : skor = 20% x Bobot Indikator yang bersangkutan

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu, dsb) dan kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya).
- Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu, dan sebagainya).
- Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu, dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- Kurang : Tidak lumbuh dan cukup jauh dari standar normal.

5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan Indikator dan penilaian masing-masing bobot.

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain memperlimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut diatas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 1998, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.



MENTERI KEUANGAN

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum penilaian kinerja perusahaan berdasarkan Indikator-Indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian terhadap masing-masing Indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan laporan keuangan menyetujui penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (Infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang diperlmbangkan
1. Pelayanan kpd pelanggan/ masyarakat	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb
3. Research & Development	10	B	8	Kepedulian manajemen terhadap R & D, dsb
Total	25		35	

III. ASPEK ADMINISTRASI

- Total Bobot
 - BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
 - BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non Infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10: Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1 Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2 Rancangan RKAP	3	3
3 Laporan Periodik	3	3
4 Kinerja PUKK	6	6
Total	15	15



MENTERI KEUANGAN

3. Metode penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
- Penentuan nilai

Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka waktu laporan Audit diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :
Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT 'A' (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dengan 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 diatas, nilai PT 'A' untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai kelentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 80 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima s/d memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.	Skor
2 bulan atau lebih cepat	3
kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1 :
Tahun anggaran BUMN PT 'A' dimulai 1/1 1999.
Rancangan RKAP BUMN PT 'A' diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 diatas pada butir diatas, nilai PT 'A' untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.
- Contoh 2 :
Tahun anggaran BUMN PT 'A' dimulai 1/1 1999.
Rancangan RKAP BUMN PT 'A' diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 diatas pada butir diatas, nilai PT 'A' untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.
Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh KomSaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.



MENTERI KEUANGAN

Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periode

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$30 < x \leq 60$ hari	1
> 60 hari	0

Contoh perhitungan

Laporan periode Triwulanan PT 'S' periode anggaran 1 Januari s/d 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum masing-masing sebagai berikut :

Triwulan	Berakhir periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/6 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x
IV	31/12 199x	10/2 199x + 1

Perhitungan Jumlah hari keterlambatan

- = Triwulan I 4
- = Triwulan II 0
- = Triwulan III 0
- = Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai '2'

Catatan : Laporan periode sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Laporan pelaksanaan RKAP
2. Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
3. Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
4. Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
5. Laporan pelaksanaan PUKK

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1 Efektivitas penyaluran	3	3
2 Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman	3	3
Total	6	6

Metode penilaian masing-masing indikator

d.1. Efektivitas penyaluran dana.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

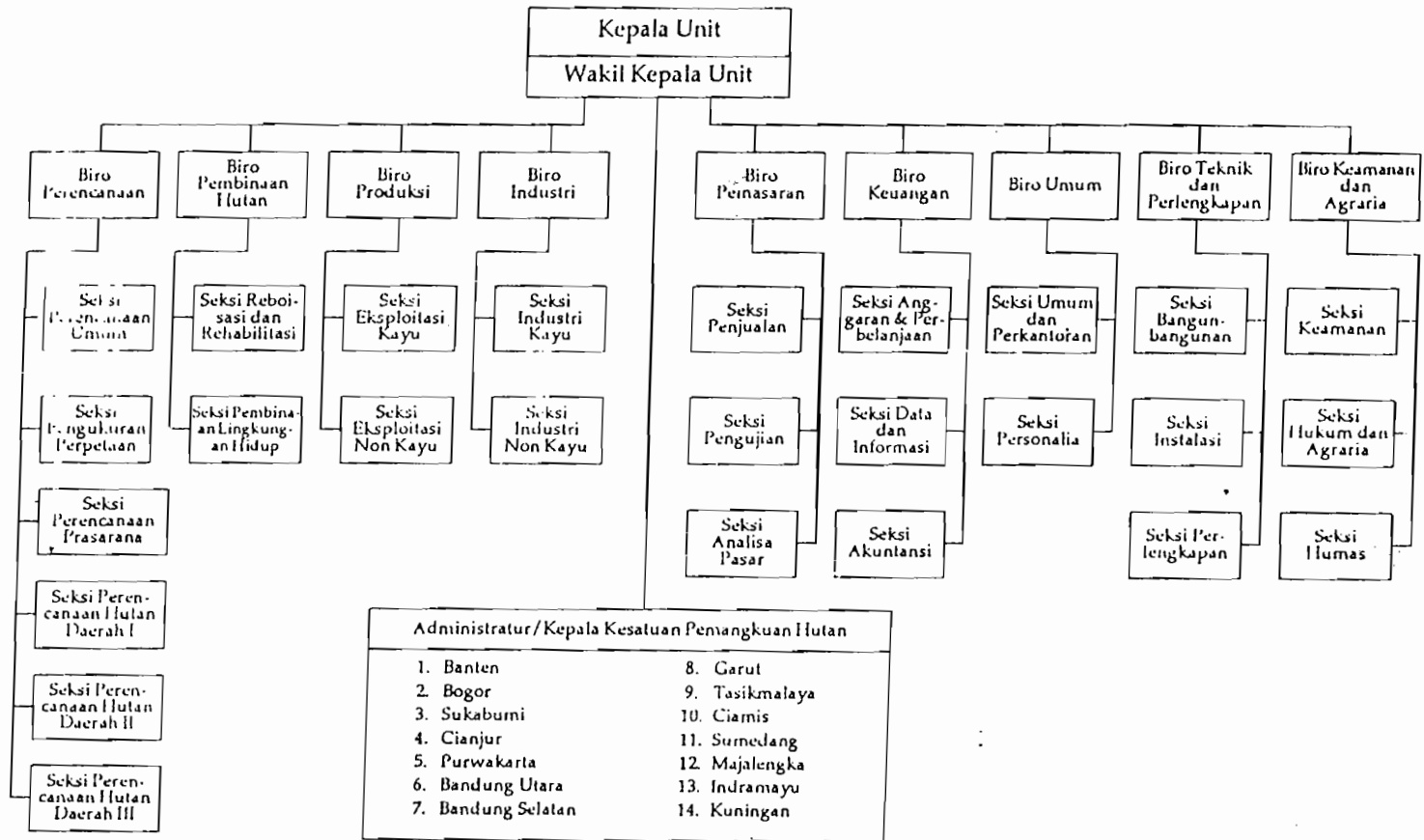


MENTERI KEUANGAN

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMIHSEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
Keunggulan Produk	<ul style="list-style-type: none"> > Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan > Inovasi produk baru yang prospektif > Memanfaatkan pengetahuan teknologi 	Kontraktor Industri kimia dasar	Hak paten, hak cipta, jaminan metode konstruksi baru, dll Konservasi energi, produk baru yang prospektif, dll
Kelembagaan dan SDM	<ul style="list-style-type: none"> > Manajerial > Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (di dalam negeri dan luar negeri) > Kaderisasi pimpinan > Delegasi kewenangan secara bertanggung jawab > Konsistensi pelaksanaan reward and punishment > Proses regenerasi pimpinan 	Berisiko umum untuk semua sektor Berisiko umum untuk semua sektor	Penyelenggaraan diklat eksekutif dan elite Kaderisasi pimpinan Penilaian kinerja jabatan Kebijakan insentif dan hukuman (R & D)
Research & Development (R & D)	<ul style="list-style-type: none"> > Pengembangan metode baru yang prospektif > Hasil riset yang bermanfaat > Perhatian perusahaan terhadap R & D 	Berisiko umum untuk semua sektor	Kepedulian insentif dan hukuman (R & D)
Hasil pelaksanaan program-program Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> > Pencapaian sasaran > Efisiensi dalam mencapai sasaran > Perhatian manajemen terhadap keterbatasan sumberdaya 	Berisiko umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran
Kepelembagaan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> > Keberhasilan lingkungan > Pelaksanaan AMDAL > Reklamasi > Estate regulation 	Berisiko umum untuk semua sektor Kehutanan Pertambangan Industri manufaktur Kawasan industri	Keberhasilan lingkungan kerja Reboisasi, AMDAL Reklamasi daerah eks tambang, AMDAL AMDAL Estate regulation, AMDAL

Susunan Organisasi Perum Perhutani Unit III Jawa Barat
(sesuai SK Direksi No. 313/Kpts./Dir/1989)

A.1



PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)

UNIT III JAWA BARAT

Alamat : Jalan Soekarno - Hatta No. 628 Km. 14 Kotakpos 1116 Bandung

7302971 (4 saluran)
perumhutunit
28302 phtuntbd
7602972

Bank : Bank BUMI DAYA
Bank NEGARA INDONESIA 1946
Bank DAGANG NEGARA

Bandung, tgl.

SURAT PENETAPAN ALOKASI PENJUALAN
(SPAP PENGGANTI SURAT PERJANJIAN JUAL BELI HASIL HUTAN)

Nomor : /073.4/Sar/III.

Perhatikan Surat Penetapan Alokasi Penjualan No : /SPAP/Dir tanggal

dengan ini menetapkan alokasi pembelian hasil hutan tahun 1997 kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat Pabrik :

Status :

Agan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Hasil Hutan :

Mutu/Ukuran :

Jumlah/Daerah :

pengambilan

Harga : Sesuai dengan harga jual yang berlaku pada saat penyerahan barang.
loko di tempat yang ditunjuk oleh Adm/KKPH.

Pembayaran : Sepanjang tidak ditentukan lain oleh Direksi, dibayar tunai di Kantor KPH pada saat penyerahan barang.

Tempat penyerahan : Ditempat yang ditunjuk oleh KPH ybs.

Cara penyerahan : Dilakukan secara bertahap dengan cara :

- a. Unit menetapkan volume penjualan untuk setiap 3 bulan (triwulan), terlampir.
- b. KPH ybs menetapkan rencana penyerahan bulanan selama 3 bulan (triwulan) tersebut dalam satu jadwal penyerahan bulanan.
- c. Bilamana pelayanan dalam triwulan yang bersangkutan akan melebihi dari yang ditentukan, Administratur agar minta ijin tambahan ke Unit Cq. Biro Pemasaran dan tidak mengganggu kelancaran pemenuhan intake.

wajiban pembeli

- : a. Mengolah sendiri pada industri sendiri.
- b. Memberikan laporan realisasi pembelian hasil hutan Minyak Kayu Putih setiap bulan kepada Unit.
- c. Mengembalikan Pas Angkutan hasil hutan kepada Adm/KKPH tempat pembelian hasil hutan, setelah Pas Angkutan tersebut diketahui instansi yang berwenang yang berdekatan dengan alamat industri milik pembeli.

ank si

- : a. Surat Penetapan Alokasi Penjualan (SPAP) ini dengan sendirinya tidak berlaku apabila :
 - 1. Menjual atau mengalihkannya kepada pihak lain.
 - 2. Minyak Kayu Putih yang dibeli ternyata diperjual belikan sebelum diproses.
- b. Pembeli kehilangan haknya atas sebagian atau seluruh alokasi bulanan yang ditetapkan oleh Adm/KKPH apabila alokasi bulanan tidak dapat diselesaikan pengambilannya pada bulan ybs tanpa memberikan alasan tertulis yang dapat diterima oleh Adm/KKPH.

Masa berlaku : s/d 1997.

ikian untuk seperlunya.

An. Kepala

Kepala Biro Pemasaran,

Ir. Soedarsono Hardjo

NIP. 080.041.255

busan kepada Yth. :

apak Kepala Unit III (sebagai laporan).

epala Biro Perencanaan.

epala Biro Produksi.

epala Biro Keuangan.

epala Biro Hukamas & Agraria.

ang bersangkutan



PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
UNIT III JAWA BARAT

Alamat : Jalan Soekarno - Hatta No. 628 Km. 14 kotakpos 1116 Bandung

Telepon : 7802971 (4 saluran)
Kawat : perumhutunit
Telex : 28302 phtuntbd
Facs : 7802972

Bank : Bank BUMI DAYA
Bank NEGARA INDONESIA 1946
Bank DAGANG NEGARA

SURAT PERINTAH PENJUALAN (S.P.P.) No. :

/ SAR / 199

Nomor :
Lampiran :

Bandung, tgl.

Kepada Yth. :
Sdr. Administratur Perhutani / K.K.P.H :

Di

K I L A T :

Berdasarkan surat permohonan tgl.
No. dengan ini kami minta hendaknya Saudara melangsungkan penjualan
hasil hutan dibawah ini :
Keperluan :
Pembayaran : Tunai. Kepada Sdr. Administratur / K.K.P.H yang bersangkutan.
Pengiriman : Diurus sendiri oleh pemohon.
Pos Penjualan :

Jenis Hasil Hutan	Dari TPK/TPN/TPKh	K A V E L I N G			H A R G A
		Nomor	Mutu	Banyaknya M3 / Sm	
					Harga penjualan langsung yang berlaku pada waktu penyerahan loco TPK/TPN/TPKh.

Penyerahan
Berlaku
Keterangan

Loco TPK/TPN/TPKh. Perum Perhutani dari Persediaan bebas (yang tidak disediakan untuk lelang dan kontrak).
Sampai dengan
a. Pemegang surat izin ini tidak diperkenankan memilih hasil hutan sendiri dan harus tunduk kepada penunjukkan Sdr. Administratur / K.K.P.H / Wakilnya.
b. Kayu-kayu / Hasil hutan tersebut S.P.P. ini seluruhnya harus diangkut ke tempat perusahaan pemesan d
c. Pungutan biaya letak dan lain-lain, berdasarkan peraturan yang berlaku
d. Apabila sampai habis masa berlakunya S.P.P. ini pemohon tidak datang atau jika Hasil Hutan yang diterima pemohon atas S.P.P. ini dipergunakan tidak sesuai dengan permintaannya, maka pemohon tidak akan diberi S.P.P. lagi dalam waktu yang tidak terbatas.
e. Bilamana 7 (tujuh) hari sesudah habis masa berlaku SPP ini tidak dimintakan perpanjangan, maka SPP ini tidak dapat diperpanjang.

PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
K E P A L A

TEMBUSAN KEPADA YTH. Sdr. :

1. Direktur Utama Perum Perhutani (Up. Yth. Sdr. Dir. Pemasaran) di Jakarta
2. Pemohon dengan permintaan supaya berhubungan langsung dengan Sdr. Adm. Perum Perhutani K.K.P.H yang bersangkutan (kilat)
3. Kepala TPK ybs. lewat Sdr. Adm. Perum Perhutani K.K.P.H yang bersangkutan (2x)
4. Ka Biro Pas Kasi Penj. pada Unit III Perum Perhutani Jawa Barat

B.2



PERUM PERHUTANI
(PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA)
UNIT III JAWA BARAT

Alamat : Jalan Soekarno - Hatta No. 628 Km. 14 kotakpos 1116 Bandung

Telepon : 7802971 (4 saluran)
Kawat : perumhutunit
Telex : 28302 phtuntbd
Facs : 7802972

Bank : Bank BUMI DAYA
Bank NEGARA INDONESIA 1946
Bank DAGANG NEGARA

SURAT PERINTAH PENJUALAN (S.P.P.) No. :

/ SAR / 199

Nomor :
Lampiran :

Bandung, tgl.
Kepada Yth. :
Sdr. Administratur Perhutani / K.K.P.H :
.....
Di
.....

K I L A T :

Berdasarkan surat permohonan tgl.
No. dengan ini kami minta hendaknya Saudara melangsungkan penjualan
hasil hutan dibawah ini :
Keperluan :
Pembayaran : Tunai. Kepada Sdr. Administratur / K.K.P.H yang bersangkutan.
Pengiriman : Diurus sendiri oleh pemohon.
Pos Penjualan :

Jenis Hasil Hutan	Dari TPK/TPN/TPKh	K A V E L I N G			H A R G A
		Nomor	Mutu	Banyaknya M3 / Sm	
					Harga penjualan langsung yang berlaku pada waktu penyerahan loco TPK/TPN/TPKh.

Penyerahan
Berlaku
Keterangan

Loco TPK/TPN/TPKh. Perum Perhutani dari Persediaan bebas (yang tidak disediakan untuk lelang dan kontrak)
Sampai dengan
a. Pemegang surat izin ini tidak diperkenankan memilih hasil hutan sendiri dan harus tunduk kepada
penunjukkan Sdr. Administratur / K.K.P.H / Wakilnya.
b. Kayu-kayu / Hasil hutan tersebut S.P.P. ini seluruhnya harus diangkut ke tempat perusahaan pemesan c
.....
c. Pungutan biaya letak dan lain-lain, berdasarkan peraturan yang berlaku
d. Apabila sampai habis masa berlakunya S.P.P. ini pemohon tidak datang atau jika Hasil Hutan yang diterim
pemohon atas S.P.P. ini dipergunakan tidak sesuai dengan permintaannya, maka pemohon tidak akan dibe
S.P.P. lagi dalam waktu yang tidak terbatas.
e. Bilamana 7 (tujuh) hari sesudah habis masa berlaku SPP ini tidak dimintakan perpanjangan, maka SPP in
tidak dapat diperpanjang.

PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT
K E P A L A

TEMBUSAN KEPADA YTH. Sdr. :

1. Direktur Utama Perum Perhutani (Up. Yth. Sdr. Dir. Pemasaran) di Jakarta
2. Pemohon dengan permintaan supaya berhubungan langsung dengan Sdr. Adm. Perum Perhutani K.K.P.H yang bersangkutan (kilat)
3. Kepala TPK ybs. lewat Sdr. Adm. Perum Perhutani K.K.P.H yang bersangkutan (2x)
4. Ka Biro Pas Kasi Penj. pada Unit III Perum Perhutani Jawa Barat

PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA

(PERUM PERHUTANI)

KESATUAN PEMANGKU HUTAN

Cianjur

Tilpon

SURAT IDZIN PENJUALAN HASIL HUTAN No. : 155 / 57

(S.I.P.H.H)

Jatah Unit/KPH *)

Cianjur tgl 13/5/57

Kepada

Yth. Sdr. Kepala TPK / IPN

Banjarsari

di

Banjarsari

KILAT

Berdasarkan Surat Perintah Penjualan Kepala Unit III Perum Perhutani Jawa Barat tanggal

17 3 57 No 212

Dengan ini kami minta saudara melangsungkan penjualan hasil hutan di bawah ini :

Keperluan : Pemasalahan
 Pemesan : Renald F. (facilembang 11.1.57)
 Pembayaran : Tunai
 Pengiriman : Wm. Sudiarta
 Pos Penjualan : Langsung

Jenis hasil hutan	Dari TPK/TPN.	K A V E L I N G			Harga
		Nomor	Kwalita	Banyaknya m ³ /sin	
Kayu Jati A II A III	Banjarsari	162	10	1,040	Harga DUT. yang berlaku pada waktu penyerahan loco Tpk/Ipn.
		168	5	1,70	
		170	6	2,00	
		167	7	2,37	

Penyerahan : loco Tpk/TPn. Perum. Perhutani dari persewaan (yang tidak disediakan untuk kelang dan P.J.K.A.)

Berlaku : Sampai tanggal 20 5 57

Keterangan :

- Pemegang surat izin ini tidak diperkenankan memilih hasil hutan sendiri dan harus tunduk kepada penunjukan Sdr. Administrator /KKPH/Wakilnya.
 - Kayu - kayu / Hasil Hutan tersebut pada Siphil. ini seluruhnya harus diangkut ke tempat perusahaan pemesan di Cianjur
 - Pungutan biaya letak dll. berdasarkan Peraturan yang berlaku.
 - Hasil Hutan yang diterima oleh pemesan atas Siphil. ini harus dipergunakan untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan : penyimpangan dari falsaf ini mengakibatkan pemesan yang bersangkutan tidak akan diberi izin lagi dalam waktu yang tidak terbatas.
 - Pemesan telah setor uang muka di kantor Perum Perhutani Unit III Bandung / K.P.H.
- tsb. kwitansi tgl.
 No sebanyak Rp

LEMBUSAN KEPADA YTH SDR :

- Kepala Biro Pemasaran
- Kepala Biro Keamanan dan Agraria
- Kepala Meja Keuangan Kantor KPH ybs.
- Yang berkepentingan

B.3

ADMINISTRATUR/KEPALA KESATUAN PEMANGKUAN
 Hutan
 JAWA BARAT
 710.005 5 828

*) Coret yang tidak perlu

SIT :

Urut 9701159 Kapling No. PEMBELI

K.P.H. : ALAMAT

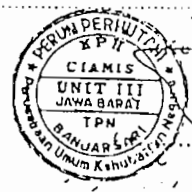
Tempat penimbunan Jenis DITAWARKAN HARGA JUAL Rp.

Tempat Penimbunan No.	U k u r a n			kwalita	Isi m3	P E N G U R A N G A N			
	Panjang m	Lebar cm	Tebal cm			Tgl.	No.Pas	No. Truk /Gerbong	Alat Angkutan Lain
<u>1</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>2</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>3</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>4</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>5</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>6</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>7</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>8</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>9</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>10</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>11</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>12</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>13</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>14</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>15</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>16</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>17</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>18</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>19</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				
<u>20</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				



Handwritten signature

B.4



Kepala T.P.K.

Handwritten signature

DAFTAR KAPLING

Urut **9701164** Kapling No. *10/11/11* PEMBELI

K.P.H. : *Perhutani* ALAMAT
 Tempat penimbunan *Perhutani* Jenis *11/11*

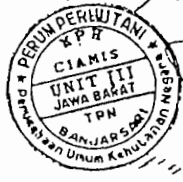
DITAWARKAN

HARGA JUAL Rp.

Tempat Penimbunan No.	U k u r a n			kwalita	Isi m ³	PENGURANGAN			
	Panjang	Lebar	Tebal			Tgl.	No.Pas	No. Truk /Gerbong	Alat Angkutan Lain
	m	cm	cm						
<i>111</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>11</i>				
<i>1</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>11</i>				
<i>11</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>11</i>				
<i>1</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>11</i>				
<i>1</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>11</i>				
<i>1</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>11</i>				
<i>1</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>11</i>				
<i>1</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>11</i>				
<i>1</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>11</i>				
<i>1</i>	<i>11</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>T</i>	<i>11</i>				



[Handwritten signature]



Kepala T.P.K.

[Handwritten signature]

CIAMIS

DAFTAR KAPLING

No. Urut **9701165** Kapling No. *111/11/11/11* PEMBELI

K.P.H. : *Alm...* ALAMAT
Tempat penimbunan *...* Jenis *H. 1-1*

DITAWARKAN

HARGA JUAL Rp.

Tempat Penimbunan No.	U k u r a n			kwalita	Isi m3	P E N G U R A N G A N			
	Panjang	Lebar	Tebal			Tgl.	No.Pas	No. Truk /Gerbong	Alat Angkutan Lain
	m	cm	cm						
<i>1/1</i>	<i>20</i>	<i>4</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>0.12</i>				
<i>1/1</i>	<i>20</i>		<i>15</i>	<i>0</i>	<i>0.15</i>				
<i>1/1</i>	<i>20</i>		<i>11</i>	<i>0</i>	<i>0.12</i>				
<i>1/1</i>	<i>20</i>		<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0.12</i>				
<i>1/1</i>	<i>20</i>		<i>11</i>	<i>0</i>	<i>0.12</i>				
					<i>0.6</i>				



Handwritten signature and notes in the bottom left corner of the table area.

Model D.K. No. 308



Kepala T.P.K. *[Signature]*

DAFTAR KAPLING

CIAMIS
No. Urut: 9701167

Kapling No. 170/c/197 PEMBELI


K.P.H. : Ciamis ALAMAT

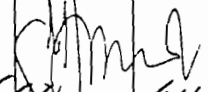
Tempat penimbunan Panjansari Jenis gaji kaji

DITAWARKAN

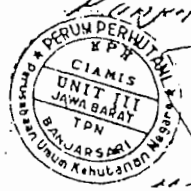
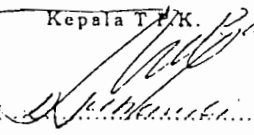
HARGA JUAL Rp.

Tempat Penimbunan No.	U k u r a n			kwalita	Isi m ³	PENGURANGAN			
	Panjang m	Lebar cm	Tebal cm			Tgl.	No. Pas	No. Truk /Gerbong	Alut Angkutan Lai
356	210	Ø	44	T	022				
434	220	.	42	T	031				
360	220	.	48	T	040				
368	230	.	40	T	030				
350	230	.	40	T	032				
447	260	.	41	T	025				
<u>621</u>					<u>3.110</u>				

Ciamis 10 23-5 77
 Perumahan KPR Ciamis

 Bambang Setiawan
 No. 710 027 200

Pasquis Kudu

 (Bintang Setiawan)
 No. 324 000 606

Model D.K. No. 308

Ciamis 10 23-5 77
 Kepala T.P.K.



PERUSAHAAN UMUM
KEHUTANAN NEGARA
(PERUM PERHUTANI)
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN

Lembar KEDUA
(Untuk Kantor Unit III)

No. 495/1997

HALAMAN 27
43927

Bon penjualan No.

Penjualan di bawah tangan dengan pembayaran tunai kepada :

Rendid

Ciamis
Tempat Penimbunan/Tempat Pengumpulan / Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Pn. Banjarsari

Jln. Cilembang - Tasikmalaya

Banyaknya	Macam	Ukuran			Isi	Kwaliteit	Harga satuan m ³ ,sm,q	Jumlah harga
		Panjang m	Tolal cm	Lebar cm				
Penjualan menurut Sipt Dir tgl. 29-12-1995 No. 1684/Kpts/Dir/1995. Penjualan menurut Sarat Unit III tgl. 26-3-1996 No. 313/074.3/Sar. SIPPH Adm Perhutani KPH Ciamis tgl. 13 Mei 1997 No. 495 / 1997. SPP Unit III Jawa Barat tgl. 17 Maret 1997 No. 212/Sar/III/1997. Kayu Bundar Jati Kap No. 162,168,170,167.								
6 Bt.	Jati A.II	200/225	d	22	0,546	P	441.000	240.786
4		200/250		25	0,494	P	513.000	253.422
10 Bt					1,040			494.208
5 Bt	Jati A.III	200/250	d	40/46	1,70	D	853.000	1.450.100
13		200/250		40/48	4,37	T	779.000	3.404.230
18 Bt					6,07			48854.330
28 Bt					7,110	Diff pj 10 %		485.433
								5.339.763
								5.833.971

(Lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah)

Kayu-kayu dicap dengan tok D.K. No.

Pas Kayu No. III-078-PPT

Ciamis, tgl. 14 Agustus 1997

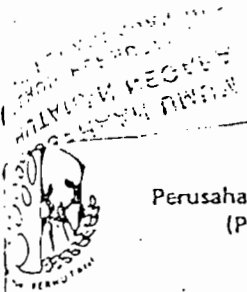
Administratur

Hasil hutan tsb. di atas yang dalam tempo sebulan terhitung dari tanggal bon penjualan ini, belum diangkut dan tidak dikenakan uang letak seperti yang ditetapkan untuk kayu lelangan.

P. Ir. Bambang Setiajudi

10.009.588

Model D.K. No. 319



Perusahaan Umum Kehutanan Negara
(PERUM PERHUTANI)

Kuitansi penjualan Hasil Hutan

Lembar :

No. Bukti :

No. Kode Pembukuan :

Terima dari :

Renaldi F. Tjandjaja

Bayarnya uang

lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima-

ratus dua puluh tiga

Pembayaran penjualan hasil hutan

Kayu gel. 100 ha sel. 2000 x 7000 m² 120 ha jawa

dengan Faktur / B.P. :

162-167-176

Tanggal

13 Mei 1997

Nomor

495

Rp.

5833971

Tanggal

Nomor

Rp.

Tanggal

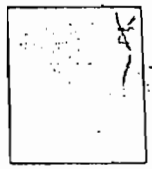
Nomor

Rp.

Bayar Rp.

5833971

Pembayaran dengan Cek/Giro Bilyet atau alat Berharga lainnya baru dianggap selesai setelah masuk dalam clearing



Cicok Gel. 120 ha 19 97
1/2000
Renaldi F. Tjandjaja
48007197



PT Dirgantara
 Jl. Sawa CT 8/94
 Yogyakarta 55821

No. 7689076

Tgl.: _____

FAKTUR PENJUALAN TUNAI

No. Urut	Kode Barang	Nama	Satuan	Harga Satuan	Kuantitas	Jumlah
Nama		No. Kode		Jumlah		
Tanda Tangan						



PT Dirgantara
 Jl. Sawa CT 8/94, Yogyakarta, 55281
 Telepon (0274) 86104
 Fax (0274) 86104

No BKK 5078

No. Cek _____

BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan _____

Jumlah Uang: Rp _____

Untuk keperluan: _____

	Tanda Tangan	Tanggal	No. Rek.	Jumlah
Direktur Keuangan				
Kapala Dep. Keuangan				
Kepala Bag.				
Kasa				

JURNAL UMUM						Halaman ____
Tanggal	Keterangan	Nomor Bukti	Nomor Rek.	Debit		Kredit

JURNAL PENJUALAN							Halaman: ____
Tanggal	Keterangan	Nomor Bukti	Piutang Dagang Debit	Penjualan Tunai Debit	Lain-lain Debit		Hasil Penjualan Kredit
					No. Rek.	Jumlah	

Nama rekening: _____ No. Rekening: _____										
Tgl.	Keterangan	Fol.	✓	Debit	Saldo	Kredit	✓	Fol.	Keterangan	Tgl.

Gambar Rekening Berkolom Saldo Di Tengah

Nama rekening: _____ No. Rekening: _____								
Tgl.	Keterangan	Fol.	✓	Debit	Kredit	D/K	Saldo	

Gambar Rekening Berkolom Saldo

Nama rekening: _____ No. Rekening: _____							
Tgl.	Keterangan	Fol.	✓	Debit	Kredit	Saldo	
						Debit	Kredit

Gambar Rekening Berkolom Saldo Debit dan Saldo Kredit

C.3

KARTU PERSEDIAAN

Nama Barang			Kode Barang			Saluan	Gudang	No Lantai	No Lokasi								
No Peking	Trik Pesan Kembali	EOQ	Maximum	Minimum	Sifat Khusus Barang												
Pembelian				Penerimaan				Pemakaian				Saldo					
Tgl	No. SOF	Jml Dipesan	Jml Diterima	Sisa Pesanan	Tgl	No LPB	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga	Tgl	No BPBG	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga

KARTU HARGA POKOK PRODUK

Nama Pemesan			Nomor Pemesan			Tanggal Mulai			
Spesifikasi					Kuantitas		Tanggal Selesai		
Biaya Bahan Baku			Biaya Tenaga Kerja Langsung			Biaya Overhead Pabrik			Anggaran Biaya:
Tgl.	No. BPPBG	Jumlah Rupiah	Tgl.	Jam Kerja	Jumlah Rupiah	Tgl.	Tarif	Jumlah Rupiah	
									Biaya Bahan Baku
									Biaya Tng. Kerja Lngs.
									Biaya Ov. Pabrik
									Jumlah
									Harga Pokok per Satuan
									Realisasi Biaya:
									Biaya Bahan Baku
									Biaya Tng. Kerja Lngs.
									Biaya Ov. Pabrik
									Jumlah
									Harga Pokok per Satuan
Otorisasi									
					Kepala Dep. Akuntansi		Kepala Bagian Akuntansi Biaya		

TERIMA KASIH

12.500,00
 15.000,00
 20.000,00
 57.000,00
 75.000,00

179.500,00 ST
 180.000,00
 500,00 C

Gambar Pita Register Kas

C-6

542195

DATE	INITIALS
AUTHORIZATION CODE	
CHECKBILL NUMBER	

CARDHOLDER

MERCHANT

DESCRIPTION	AMOUNT
TOTAL	Rp

CARDHOLDER SIGNATURE

X

THE AMOUNT OF THE CHARGE IS RECORDED HERE ON WRITING MADE BY ME SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF WHICHEVER AGREEMENT WITH THE CARD ISSUER AND RECEIPT OF THE SERVICE OR MERCHANDISE IS HEREBY ACKNOWLEDGED BY ME

SALES SLIP

MERCHANT COPY

Gambar Credit Card Sale Slip

C-7



PT Elora Sari
Jln. Sawa C1 894 Karanggayuh,
Yogyakarta 55281

NOMOR SURAT ORDER PENGIRIMAN		NOMOR PELANGGAN			NOMOR SURAT ORDER PELANGGAN		TANGGAL	
NOMOR	LOKASI	DEPT	RATAS KREDIT	JENIS	NOMOR	TANGGAL	DEPT	DATE

ISILAH DENGAN HURUF CETAK

DIKIRIM KEPADA

DITE BAWA OLEH _____ TANGGAL _____
 Sebagai keterangan yang Saudara temukan pada saat menerima barang ini barang ini akan
 Turunkan nomor katalog barang jika merupakan barang yang Saudara temukan


DIKIRIM MELALUI		JML KALI ANGIKUT	TGL KIRIM	PARCEL POST	JUMLAH BIAYA ANGIKUT
				Rp	Rp

JENIS YG DIPESAN	JENIS YG DIKIRIM	NOMOR KATALOG	UNIT	KETERANGAN	KUANTITAS BACK ORDER	JENIS YG DIBATALKAN	BERAT

JML UNIT YG DIKIRIM	PERUSAHAAN ANGIKUTAN UMUM	JML BERAT YG DIKIRIM
---------------------	---------------------------	----------------------

Manajer Bagian Pengiriman

Gambar Bill of Lading




Toko Buku REMAJA
 Jl. Lawu 15, Yogyakarta 55213
 Telp. (0274) 63539 Fax (0274) 66104

FAKTUR PENJUALAN COD

Nama Pembeli		Alamat		Tanggal	Nomor Bill of Lading	Nomor Faktur 125897689
Nomor Urut	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Harga Satuan	Kuantitas	Jumlah Harga
Jumlah						
	Dicatat dlm Buku Pembantu	Dicatat dlm Jurnal	Diterima oleh Pelanggan	Diserahkan	Dijual	
Tanggal						
Tanda Tangan						

Gambar Faktur Penjualan COD

C.9



BANK ARTA SELAMAT
 Yogyakarta

No 987679
 Tgl.

BUKTI SETOR BANK

Nama:	Bank	No. Cek	Jumlah Rupiah
No. Rekening:			
Tanda Tangan Penyetor	Credit Card Sales Slip		
	Uang Tunai		
	Jumlah		
Jumlah Rupiah	Pengesahan Bank		

C.10

**Hasil Hutan Kayu
Penjualan Kayu Pertukangan Tahun 1987 - 1991**

No.	K P H	Kayu Pertukangan Jati (M3)					Kayu Pertukangan Rimba (M3)				
		1987	1988	1989	1990	1991	1987	1988	1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Banten	583	3.672	3.579	2.564	2.216	0	153	456	554	221
2.	Bogor	5	0	0	0	0	399	48	302	613	1.232
3.	Sukabumi	8.727	8.897	6.156	8.146	5.157	13.269	171.262	16.717	17.778	14.460
4.	Cianjur	10.210	12.430	10.794	11.989	11.1157	4.367	4.938	7.399	4.817	4.160
5.	Purwakarta	4.478	6.260	6.081	5.907	5.844	85	1.041	5.421	3.062	2.789
6.	Bandung Utara	2.792	4.946	4.731	3.162	1.310	14.680	11.701	11.688	15.795	9.173
7.	Bandung Selatan	147	109	30	42	38	13.691	11.178	12.922	13.009	11.734
8.	Garut	2.534	2.630	2.722	1.594	1.284	12.294	13.331	14.650	16.453	15.491
9.	Tasikmalaya	2.096	2.542	2.496	1.342	871	11.877	6.792	8.078	6.164	10.192
10.	Ciamis	11.704	12.136	12.936	6.818	7.864	2.400	2.691	3.024	222.27	3.399
11.	Kuningan	666	1.902	1.892	1.917	1.002	3.008	8.548	14.500	21.579	9.359
12.	Majalengka	1.972	1.382	1.119	1.908	683	3.767	4.093	4.265	4.980	5.480
13.	Indramayu	6.098	8.052	8.113	8.260	9.675	460	808	163	208	146
14.	Sumedang	7.079	11.137	7.601	11.464	7.113	16.270	29.554	25.167	28.656	30.432
15.	U n i t	0	0	0	0	0	0	62	165	35	0
	Jumlah	59.083	76.096	68.232	65.113	54.172	96.567	102.200	124.918	135.980	118.268

D.1

Penjualan Kayu Pertukangan Melalui DBT Dalam Tahun 1987 - 1991

No.	K P H	Kayu Pertukangan Jati (M3)					Kayu Pertukangan Rimba (M3)				
		1987	1988	1989	1990	1991	1987	1988	1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Banten	95	86	332	362	268	0	143	375	382	132
2.	Bogor	5	0	0	0	0	399	48	302	575	654
3.	Sukabumi	710	102	827	2.933	400	6.238	8.332	7.301	9.800	5.186
4.	Cianjur	2.277	890	4.317	3.163	3.040	3.447	3.713	6.099	3.563	2.792
5.	Purwakarta	991	1.081	1.522	1.816	1.608	76	718	883	1.928	2.281
6.	Bandung Utara	314	80	1.360	234	82	5.596	2.411	2.553	4.240	826
7.	Bandung Selatan	3	109	0	40	19	6.416	6.607	4.563	6.678	5.897
8.	Garut	600	409	513	682	603	8.069	5.201	3.295	5.414	3.809
9.	Tasikmalaya	606	208	1.178	423	295	5.206	2.201	2.622	1.427	1.234
10.	Ciamis	3.223	1.281	4.884	2.706	2.836	1.687	1.177	863	1.791	1.207
11.	Kuningan	163	337	477	942	478	1.594	1.441	3.505	8.410	3.932
12.	Majalengka	234	224	262	763	40	795	1.208	787	1.709	1.044
13.	Indramayu	2.286	3.196	2.547	3.172	3.036	316	518	157	208	100
14.	Sumedang	3.166	3.031	3.691	4.507	2.360	2.112	3.838	2.382	4.747	6.648
15.	U n i t	2	0	0	0	0	0	62	165	35	0
	Jumlah	14.709	11.034	21.910	21.743	15.085	41.951	37.078	35.852	50.907	35.744

D.2

Penjualan Kayu Bakar Dalam Tahun 1987 - 1991

No.	K P H	Kayu Bakar Jati (SM)					Kayu Bakar Rimba (SM)				
		1987	1988	1989	1990	1991	1987	1988	1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Banten	280	65	3.579	2.564	191	0	77	24	22	55
2.	Bogor	0	0	0	0	0	926	886	1.480	3.816	1.985
3.	Sukabumi	34	0	30	16	74	1.107	1.216	795	667	301
4.	Cianjur	341	682	1.390	3.350	619	1.198	997	451	735	38
5.	Purwakarta	1.531	1.840	1.511	3.161	3.872	1.928	7.407	6.545	4.760	4.321
6.	Bandung Utara	877	2.530	1.425	1.247	875	1.651	1.193	1.212	1.616	913
7.	Bandung Selatan	45	37	45	60	55	334	219	149	162	9 ²
8.	Garut	0	400	35	380	84	2.188	351	383	240	41
9.	Tasikmalaya	105	100	195	235	137	1.291	596	118	588	20
10.	Ciamis	2.500	1.147	1.199	1.395	1.406	590	746	149	115	29
11.	Kuningan	757	1.279	689	1.040	201	514	752	1.614	5.564	4.008
12.	Majalengka	3.403	3.094	3.788	2.826	0	2.188	1.845	8.328	4.461	1.202
13.	Indramayu	3.263	10.107	6.835	10.960	5.983	5.641	6.312	11.109	4.510	3.896
14.	Sumedang	9.322	9.959	6.689	18.718	6.573	19.496	20.460	16.354	26.968	16.266
	Jumlah	22.458	31.240	24.020	42.275	20.070	39.052	43.057	48.711	54.223	33.987

D-3

Penjualan Hasil Hutan Non Kayu Melalui DBT
Dalam Tahun 1987 - 1991

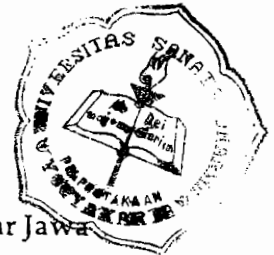
No.	K P H	Minyak Kayu Putih (Ltr)					Terpentin (Ltr)				
		1987	1988	1989	1990	1991	1987	1988	1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bogor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sukabumi	2.309	1.000	1.069	1.072	108	0	0	0	0	0
4.	Cianjur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Purwakarta	511	1.834	110	120	185	0	0	0	0	0
6.	Bandung Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bandung Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Garut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ciamis	1.186	582	78	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kuningan	1.194	882	400	120	120	0	0	0	0	0
12.	Majalengka	707	80	250	3	3	0	0	0	0	0
13.	Indramayu	16.325	470	264	6.172	6.172	0	0	0	0	0
14.	Sumedang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kantor Unit	0	0	0	0	0	0	36.200	56.000	31.093	0
	Jumlah	23.332	4.848	2.171	7.487	6.588	0	36.200	56.000	31.093	0

D.4

Penjualan Hasil Hutan Non Kayu Dalam Tahun 1987 - 1991

No.	KPH	Arang (Ton)					Rotan (Ton)				
		1987	1988	1989	1990	1991	1987	1988	1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bogor	0	0	10	5	22	72	0	15.845	5.000	0
3.	Sukabumi	239	69	145	141	89	0	0	0	8.100	0
4.	Cianjur	7	89	165	93	104	33	0	6.125	0	0
5.	Purwakarta	0	0	0	0	0	3	0	0	6.850	0
6.	Bandung Utara	1	19	35	62	42	0	0	0	0	0
7.	Bandung Selatan	263	176	157	286	190	0	0	0	0	0
8.	Garut	100	86	89	212	42	7	0	0	110.714	0
9.	Tasikmalaya	0	0	0	3	0	13	15.057 &	0	0	0
10.	Ciamis	0	0	0	0	0	0	1.390 kg	0	0	0
11.	Kuningan	0	0	0	0	0	0	700btg	0	0	0
12.	Majalengka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Indramayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797
14.	Sumedang	0	0	10	21	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	610	439	611	824	489	130	0	21.970	130.664	0

D-5



Pemasukan Kayu dan Hasil Hutan Lainnya Dari Luar Jawa
Ke Wilayah Jawa Barat Melalui Pelabuhan Banten
Dalam Tahun 1987 - 1991

No.	Jenis	Satuan	Tahun				
			1987	1988	1989	1990	1991
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kayu Pertukangan						
	- Meranti	m3	154.152,02	0,00	161.632,40	0,00	,00
	- Keuring	m3	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	- Kamper	m3	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	- Terentang	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Campuran	m3	9.716,16	0,00	11.579,85	3.632,50	4.526,25
	- Borneo	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Lain-lain	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		163.868,18	0,00	173.212,25	3.632,50	4.126,25
2.	Lain Hasil Hutan						
	- Rotan	Ton	1,20	3,20	140,50	115,00	0,00
	- Kopal	Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Damar	Ton	87,60	42,50	64,50	435,50	10,00
	- Kulit Kayu Manis	Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sirap	Lbr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D-6